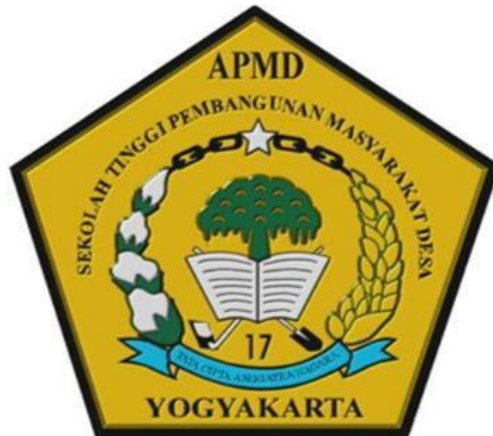


SKRIPSI
PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENERAPAN
PELAYANAN BERBASIS *E-GOVERNMENT* KEPADA
MASYARAKAT

(Studi di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman)



OLEH

SILAS CLLAUDIO ADAM IMBEYOPER

NIM: 20520015

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025



HALAMAN JUDUL

**PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENERAPAN PELAYANAN
BERBASIS *E-GOVERNMENT* KEPADA MASYARAKAT**

**(Studi di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten
Sleman)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan
Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

Silas Cllaudio Adam Imbeyoper

20520015

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Februari 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Analius Giawa, S.IP., M.Si

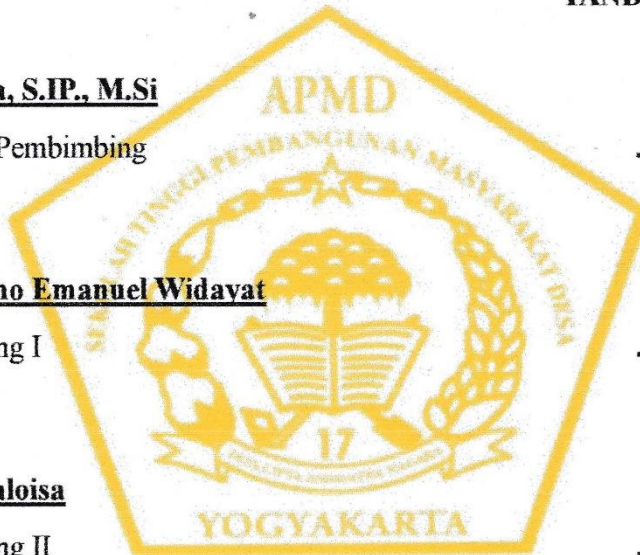
Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Penguji Samping I

Dr. Rijel Samaloisa

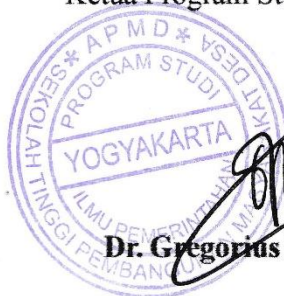
Penguji Samping II



.....
.....
.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Silas Cllaudio Adam Imbeyoper

Nim : 20520015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemerintah Kalurahan Dalam Penerapan Pelayanan Berbasis *E-Government* Kepada Masyarakat (Studi di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 18 Februari 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TBL', '20', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '474A4AMX184475519'.

Silas Cllaudio Adam Imbeyoper

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Silas Cllaudio Adam Imbeyoper

NIM : 20520015

Telp : 082199692606

Email : silasclaudioadamimbeyoper@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pemerintah Kalurahan Dalam Penerapan Pelayanan Berbasis E-Government Kepada Masyarakat (Studi di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman)

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Silas Cllaudio Adam Imbeyoper
20520015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Karena atas berkat dan Rahmat-nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasi penulis karean berkat doa dan dukungan mereka penulus dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini.
2. Teristimewa Kepada pahlawan, cinta pertama penulis, referensi hidup hidup terbaik selama penulis hidup hingga saat ini yakni, **Bapak Seblum Imbeyoper** dan **Ibu Lince Yati Wanma** yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Keduanya merupakan merupakan sosok orang tua yang berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam Skripsi ini adalah buah dari kerja keras yang disertai doa dari kedua orang tuaku. Skripsi ini adalah persembahan dari anak kalian yang saat ini sudah mulai tumbuh dewasa. Terimakasih atas nasehat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah kaki penulis. Skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang sudah bapak ibu berikan buat penulis.
3. Terimakasih juga kepada tete dan nene dari bapa, tete Mateus Imbeyoper dan nene Balandina Mayor yang mana selalu meberikan Doa dan nasehat, dan terimakasih juga kepada tete dan nenek dari mama, Leonart Wanma dan Lena Mentansan yang mana juga memberikan doa dan nasehat kepad penulis.

4. Kepada bapa ade, mama ade, tante, om Yakni Sefanya Imbeyoper, Miryam Urbinas, Kristian Kabera dan mama ade Trivena Wanma, bapa ade Korneles Imbeyoper, tante Evi Natalia Imbeyoper, om Yohan Wanma, tante Oyana, om Jasper Wanma
5. Kepada Adik-adik terkasih yakni, Yermias Imbeyoper, Nabila Imbeyoper, Anatasya Imbeyoper, Mariver Imbeyoper, Welmina Imbeyoper, Meyta Imbeyoper, Yan Imbeyoper, Milan Imbeyoper, dan Helena Kabera, Nengsi Kabera, Riko Wanma, Marcelo.

MOTTO

“Pertolonganku Ialah Dari Tuhan Yang Menciptakan Langit dan Bumi”

(Mazmur 121:2)

“TUHAN Akan Menjaga Keluar Masukmu, Dari Sekarang Sammapai Selamanya”

(Mazmur 121: 8)

“Hanya Para Pembenci Yang tidak Mengakui dan Percaya Kalau Saya Bisa Menyelesaikan Skripsi Saya”

(Silas Cllaudio Adama Imbeyoper)

“Kenem Faro Farkarkor (Hidup Untuk Pendidikan) dan Farkarkor Faro Kenem (Pendidikan Untuk Hidup)”

(Markus Wanma)

"Tetaplah berusaha, karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada tujuan besar"

(Sultan Alor)

“Komitmen Adalah Tidakan Bukan Sekedar Kata”

(Lukas Nack)

“Pensil Semakin Pendek, Semakin Panjang Pemikiran Kita”

(Yanes Beladau Tunas Patria)

“Hidup itu Perkara Kata Dan Rasa”

(Muis)

“Kerjakan Baigan Kita Selebihnaya Serahkan Kepada TUHAN AMIN”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pemerintah Kalurahan Dalam Penerapan Pelayanan Berbasis *E-Government* Terhadap Masyarakat” (Studi di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, di kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah berbesar hati menerima saya sebagai anak bimbingan, serta senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir.
5. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat. selaku Dosen penguji satu saya, yang sudah membantu dan membimbing penulis serta sumbangan pemikiran, pengetahuan dan gagasannya.

6. Bapak Dr. Rijel Samaloisa. selaku Dosen penguji Dua saya, yang sudah meluangkan waktunya membantu dan membimbing penulis serta menyumbangkan pemikiran, pengetahuan dan gagasan-gagasannya.
7. Bapak/Ibu Dosen, yang sudah bersedia meluangkan waktu melayani, memberikan ilmunya dan mendidik selama penulis menimba ilmu di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD"Yogyakarta
8. Pemerintah Kalurahan Widodomartani yang telah bersedia dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Dan kepada para masyarakat Kalurahan Widodomartani yang telah bersedia untuk menjadi narasumber penulis ucapkan limpah terima kasih.
9. Kepada Keluarga Besar IPMARAM, yang merupakan Rumah, Wadah bagi penulis Ketika penulis menjalani Studi di Kota Yogyakarta
10. Kepada abang Adrianus Oulaana (sri sultan alor) yang mana telah membantu dan memberikan nasehat sebagai abang bagi saya terimakasih
11. Kepada nene selvi wanma dan tete hendri AG wairara, terimakasih karna selalu membantu Dalam perkuliahan saya.
12. Kepada bapa ade Kosam Giovani Krey yang dari awal masuk perkuliahan di Jogjakarta telah membantu dan menjadi orang tua bagi saya di tanah rantau, dan menjadi orang yang paling banyak memberikan nasehat dan pemahaman bagaimana menjadi anak rantau terimakasih, kepada om Rainer, kaka besar Marunus Mofu dan Kaka Sisko Mofu, yang mana suda menjadi orang tua juga di tanah rantau Jogjakarta, terimaksi banyak.
13. Kepada sahabat kecil saya Riki Rumaryo Mayor dan Iswanto Kailupa
14. Kepada teman- teman KKN Gandekan (Auliana Jokowi, ade April, Cindy, Audia, mas Bayu, mas Bima, ade Dewa, ade Osep) dan ibu induk semang di gandekan, terimakasih karena suda menjadi teman dan saling membantu di tempat kkn dan ibu yang mana suda menerima kami dan suda angap kami sebagai adik-adik nya.

15. Kepada Famili Rudi Rumburen, Kaka Theyis, dan Kaka Gibe. Terimakasih banyak karenah telah menjadi kaka yang baik bagi penulis selama penulis menjalani studi di Kampus “Sarjana Rakyat”
16. Kepada “Squad Tongkrongan Malam Pantang Pulang Sebelum Pagi” (Abang Sultan, Kaka Elton, dan Lukas Nack) Trimaksi dan Tetap semangat. Skripsi ini bukan Akhir dari Tongkrongan kita tetati sebagai Awal yang baik untuk Kekeluargaan Kita. Satu Kata “Panjang Umur dan Tumbuh Subur Squad Tongkrongan Pantang Pulang Sebelum Pagi”
17. Kepada teman-teman seperjuangan, bapa ade timo krey, famili maurundi, kirana rumbiak, dina marandof, nur karisma, ade mey mnsen, ade sance mofu ,ade fitri, agnes dimara, hosea doloksaribu, bapa ade marko mayor, bapa ade jems mayor, isak rejau, adris kapitarau, beliau yairus urbinas, simon urbinas, nabas dimara, tanta since mayor tanta orpa mayor, pade denil mayor, kk april woromboy, kk April rumbiak, alisia rumbiak, famili ina mirino, ade valen rumbiak dan yang belum saya sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang solutif guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Yogyakarta 18 Februari 2025

Silas Cllaudio Adam Imbeyoper

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Literatru Review.....	10
G. Kerangka Konseptual.....	19

1.	<i>E-Government</i>	19
2.	Pemerintah Desa	28
3.	Pelayanan Publik.....	30
H.	Metode Penelitian.....	33
1.	Jenis Penelitian.....	33
2.	Teknik Pengumpulan Data	34
3.	Unit Analisa Data.....	41
4.	Teknik Analisis Data	43
BAB II PROFIL KALURAHAN WIDODOMARTANI		45
A.	Sejarah Kalurahan Widodomartani	45
B.	Kondisi Geografis	46
1.	Peta Kalurahan Widodomartani	47
2.	Pembagian Wilayah Kalurahan Widodomartani	49
C.	Keadaan Demografis	50
1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	50
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.	53
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.	55
D.	Kondisi Sarana Dan Prasarana	56
1.	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	56
2.	Sarana dan Prasarana Kesehatan	58

3. Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	60
E. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Widodomartani.....	61
1. Visi dan Misi Kalurahan Widodomartani.....	61
2. Struktur Pemerintahan Kalurahan Widodomartani	63
F. Aplikasi Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan (SIDAMPAK).....	68
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENERAPAN PELAYANAN BERBASIS <i>E-GOVERNMENT</i> KEPADA MASYARAKAT	
A. <i>E-Government</i> dalam menjalankan pemerintahan yang efektif	73
B. <i>E-Government</i> dalam menjalankan pemerintahan yang efisien.....	78
C. <i>E-Government</i> dalam menjalankan pemerintahan yang interaktif.....	82
BAB IV PENTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTARPUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94
PEDOMAN WAWANCARA.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Tabel Informan Penelitian	42
Tabel 2. 1. Tabel Pembagian Wilayah Kalurahan Widodomartani	49
Tabel 2. 2. Tabel Struktur Pemerintah Kalurahan Widodomartani	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Peta Kalurhana Widodmartani	47
Gambar 2. 2. Grafik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Gambar 2. 3. Grafik . Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Gambar 2. 4. Grafik . Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	53
Gambar 2. 5. Grafik Penduduk Berdasarkan Agama	55
Gambar 2. 6. Grafik Sarana dan Prasarana Pendidikan	57
Gambar 2. 7. Grafik Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	58
Gambar 2. 8. Grafik Sarana dan Prasarana Keagamaan	60
Gambar 2. 9. Struktur Pemerintah Kalurhan Widodomartani.....	65
Gambar 2. 10. Aplikasi Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan	68

INTISARI

Penerapan *E-Government* di desa merupakan bagian dari transformasi digital yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Pasca lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa mendapatkan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola anggaran dan mengatur urusan pemerintahan secara mandiri. Penerapan prinsip *E-Government* di desa bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta mampu menjawab berbagai tantangan di era digital. Dalam konteks desa, penerapan prinsip-prinsip *E-Government* menjadi krusial untuk mempercepat proses transformasi menuju desa yang lebih maju, cerdas, dan mandiri. Penerapan *E-Government* di Kalurahan Widodomartani menghadapi sejumlah tantangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pelayanan publik, masih terdapat masalah terkait aksesibilitas teknologi bagi seluruh warga, kesenjangan pemahaman penggunaan platform digital, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. subjek dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan Widodomartani dan Masyarakat Kalurahan Widodomartani. Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Widodomartani belum sepenuhnya menerapkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik sesuai dengan peraturan pemerintah maupun peraturan Kabupaten Sleman yang berlaku. Meskipun ada upaya untuk menjalankan sistem *E-Government*, pelaksanaannya belum terwujud secara utuh dan justru terkesan semu. Pelayanan yang ada saat ini tidak memberikan dampak yang signifikan dalam hal efektivitas, efisiensi, maupun interaktivitas antara pemerintah kalurahan dan masyarakat.

Bagi masyarakat, pelayanan *E-Government* yang ada belum mampu memberikan kemudahan yang diharapkan. Bahkan, bagi sebagian warga, sistem ini lebih dirasakan merugikan dan tidak menguntungkan karena kesulitan dalam mengakses aplikasi, keterbatasan pemahaman terhadap teknologi, dan kurangnya dukungan teknis yang memadai. Oleh karena itu, meskipun ada niat baik dalam mengimplementasikan *E-Government*, pemerintah Kalurahan Widodomartani perlu melakukan evaluasi dan perbaikan agar layanan berbasis elektronik dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan interaktif serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: *E-Government*, Pelayanan Publik, Pemerintah Kalurhana.

ABSTRACT

The implementation of E-Government in villages is part of the digital transformation that supports development and public services at the village level. After the enactment of the Village Law No. 6 of 2014, villages gained broader authority in managing budgets and handling governmental affairs independently. The application of E-Government principles in villages aims to create a more transparent, efficient, participatory, and accountable governance system that can address various challenges in the digital era. In the context of villages, applying E-Government principles is crucial to accelerating the transformation process towards more advanced, smart, and independent villages. The implementation of e-government in Kalurahan Widodomartani faces several challenges, which are the focus of this study. Despite efforts to integrate digital technology into public services, there are still issues related to technology accessibility for all citizens, gaps in understanding the use of digital platforms, and infrastructure that has not fully supported it.

This study uses a qualitative descriptive method. The subjects of this study consist of the Government of Kalurahan Widodomartani and the residents of Kalurahan Widodomartani. The subjects were selected through purposive sampling techniques.

The results of this study show that the Government of Kalurahan Widodomartani has not fully implemented electronic-based population administration services in accordance with the applicable government regulations and Sleman District regulations. Although there have been efforts to implement the E-Government system, its execution has not been fully realized and seems superficial. The existing services have not made a significant impact in terms of effectiveness, efficiency, or interactivity between the village government and the community.

For the community, the existing E-Government services have not been able to provide the expected convenience. In fact, for some residents, this system is perceived as more detrimental and unbeneficial due to difficulties in accessing the applications, limited understanding of technology, and lack of adequate technical support. Therefore, despite the good intentions in implementing E-Government, the Government of Kalurahan Widodomartani needs to evaluate and improve the system so that electronic-based services can run more effectively, efficiently, interactively, and truly benefit the community.

Keywords: E-Government, Public Services, Village Government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan *E-Government* di desa merupakan bagian dari transformasi digital yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Pasca lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa mendapatkan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola anggaran dan mengatur urusan pemerintahan secara mandiri. Undang-undang ini membuka peluang bagi desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi, yang dikenal dengan istilah *E-Government*.

Sebagai respons terhadap tuntutan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penerapan *E-Government* menjadi salah satu solusi yang relevan. Dalam konteks ini, *E-Government* di desa tidak hanya berfokus pada digitalisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga pada peningkatan akses informasi, pengelolaan data desa secara efisien, serta pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

Pemerintah pusat dan daerah, melalui berbagai kebijakan dan program, mulai mendorong desa-desa untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan pemerintahan mereka. Salah satu contoh yang signifikan adalah pengembangan sistem informasi desa (SID) yang dapat membantu dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pelaporan kegiatan desa secara terbuka. Sistem ini memungkinkan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan

terkait dengan penggunaan dana desa. Namun, meskipun terdapat potensi besar, penerapan *E-Government* di desa juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat desa, serta kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem digital tersebut. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa serta masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar *E-Government* dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal.

Dengan demikian, penerapan *E-Government* pasca lahirnya Undang-Undang Desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa, yang pada gilirannya dapat mendorong tercapainya pembangunan desa yang lebih mandiri, efisien, dan transparan.

E-Government dalam pelayanan publik merupakan suatu tuntutan serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap kalangan pemerintah, dimana hal ini telah diatur sesuai dengan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, dan berkaitan dengan Pelayanan Publik yang berdasarkan Undang-Undang No.

23 Tahun 2009. Dimana setiap peraturan ini merujuk kepada perbaikan dalam kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi, efisiensi serta menciptakan *Good Governance*. Produk *E-Government* yang dikembangkan oleh pemerintah daerah beragam. Keragaman itu, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa indikator seperti: platform, target pengguna, tujuan pembuatan, dan indikator lainnya. *Website* merupakan salah satu produk *E-Government* sebagai media untuk meningkatkan minat dan kesempatan

kepada masyarakat dalam menyediakan pelayanan publik dan umpan balik dari masyarakat. Sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif

Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam mendukung *E-Government* di desa memang bukan hal yang mudah. Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan adalah belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengaruh pada pemanfaatan TIK di tingkat desa. Oleh karena itu, SDM perlu dipersiapkan agar siap melaksanakan *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya offline beralih ke *online*. Hal ini perlu dilakukan mengingat *E-Government* merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat.

Penerapan prinsip *E-Government* di desa bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta mampu menjawab berbagai tantangan di era digital. Dalam konteks desa, penerapan prinsip-prinsip *E-Government* menjadi krusial untuk mempercepat proses transformasi menuju desa yang lebih maju, cerdas, dan mandiri. Berikut adalah beberapa prinsip utama *E-Government* yang diterapkan di desa:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas

3. Partisipasi Masyarakat
4. Efisien dan Efektivitas
5. Kemudaha Akses dan Inklusivitas
6. Keamanan dan Perlindungan Data

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam *E-Government* di desa diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan potensi desa, dan mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun tantangan dalam hal infrastruktur dan literasi digital masih ada, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah desa serta dukungan masyarakat, *E-Government* dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan desa.

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen kuat untuk mempercepat pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mendukung penerapan *E-Government* di tingkat desa, yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sebagai bagian dari langkah menuju *E-Government*, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan beberapa target strategis agar setiap desa dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Target utama yang pertama adalah memastikan setiap desa memiliki infrastruktur TIK yang memadai, seperti akses internet yang cepat dan stabil serta perangkat keras yang mendukung operasional *E-Government*. Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan jaringan internet merata di seluruh desa karena konektivitas yang baik sangat penting untuk keberhasilan *E-Government*, yang juga akan

memperluas akses masyarakat dan pemerintah desa dalam berinteraksi serta mengelola layanan secara digital.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan digitalisasi seluruh sistem administrasi pemerintahan desa melalui implementasi Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi di setiap desa. Digitalisasi ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data penduduk, administrasi kependudukan, keuangan desa, serta perencanaan pembangunan desa, sekaligus mengurangi kesalahan dalam pengelolaan manual. Dalam rangka mendukung pengembangan TIK tersebut, pemerintah Kabupaten Sleman juga fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam keterampilan teknologi, memberikan pelatihan dan pendampingan agar aparatur desa dapat menggunakan sistem digital dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Target penting lainnya adalah pengembangan aplikasi dan sistem *E-Government* yang terintegrasi, yang mempermudah interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kabupaten. Aplikasi seperti sistem pelaporan kegiatan desa, monitoring anggaran, dan layanan permohonan surat atau dokumen akan tersedia secara *online*, memudahkan akses masyarakat tanpa harus datang ke kantor desa, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan layanan. Pemerintah Kabupaten Sleman juga menargetkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi, seperti platform *online* untuk konsultasi publik, musyawarah desa, dan pengajuan aspirasi, yang akan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi penggunaan anggaran desa secara real-time. Hal ini akan mempermudah pengawasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan ekosistem digital yang mendukung pembangunan desa, dengan mendorong desa-desa di Sleman memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produk unggulan desa melalui platform digital atau e-commerce, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal.

Dengan pengembangan TIK ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih cerdas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Target-target yang telah ditetapkan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di tingkat desa dan menjadikan *E-Government* di desa-desa Sleman sebagai model bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan digitalisasi pemerintahan di masa depan.

Pelayanan berbasis *E-Government* di Kalurahan Widodomartani, Sleman, meskipun telah dimulai, masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi implementasinya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tingkat penguasaan teknologi di kalangan masyarakat yang belum merata. Sebagian besar warga Kalurahan Widodomartani masih belum terbiasa menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengakses layanan pemerintah secara *online*.

Meskipun pemerintah kalurahan telah berupaya mengimplementasikan berbagai aplikasi *E-Government* untuk memudahkan proses administrasi, seperti pengajuan surat, izin, dan pelaporan data kependudukan secara digital, tidak semua masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Beberapa warga, terutama yang berusia lanjut atau memiliki keterbatasan dalam akses ke perangkat teknologi, kesulitan untuk mengakses layanan tersebut. Hal ini mengakibatkan mereka lebih memilih untuk datang langsung ke kantor desa, meskipun hal itu berpotensi menambah antrian dan mengurangi efisiensi pelayanan.

Selain itu, meskipun telah ada beberapa pelatihan bagi aparat desa untuk mengoperasikan sistem *E-Government*, tingkat pemahaman teknologi di kalangan masyarakat secara umum masih rendah. Banyak warga yang belum familiar dengan cara menggunakan aplikasi, bahkan beberapa di antaranya masih mengandalkan metode tradisional dalam berurusan dengan administrasi pemerintahan. Keterbatasan dalam literasi digital ini menjadi penghambat bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan yang lebih efisien dan transparan melalui teknologi.

Upaya pemerintah kalurahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya *E-Government* masih perlu diperkuat, misalnya dengan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif dan mudah dipahami. Pelatihan teknologi yang lebih menyeluruh, tidak hanya untuk aparat desa tetapi juga untuk masyarakat, menjadi kunci agar mereka bisa lebih mandiri dalam mengakses layanan *online* yang telah disediakan. Selain itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur teknologi, seperti akses internet

yang lebih stabil dan merata, agar masyarakat di seluruh wilayah desa dapat dengan mudah mengakses layanan berbasis *E-Government*.

Secara keseluruhan, meskipun Kalurahan Widodomartani telah berusaha untuk mengimplementasikan sistem *E-Government*, tantangan dalam penguasaan teknologi oleh masyarakat menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan pelayanan ini. Dengan adanya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta peningkatan kapasitas digital bagi masyarakat, diharapkan pelayanan berbasis *E-Government* di Desa Widodomartani dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan arah dari sebuah penelitian. Fokus penelitian juga merupakan bagian dari strategi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan juga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam mengumpulkan informasi. Maka dari itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *E-Government* dalam mendukung pelayanan pemerintah yang efektif
2. Bagaimana *E-Government* dalam mendukung pelayanan pemerintah yang efisien
3. Bagaimana *E-Government* dalam mendukung pelayanan pemerintah yang interaktif

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana *E-Government* mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Desa di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui *E-Government* dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Desa di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai manfaat. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yakni manfaat secara praktis dan manfaat secara akademis:

a. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kalurahan Widodomartani dalam mengoptimalkan penerapan *E-Government* untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kepada Masyarakat di desa tersebut.

b. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dengan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan

terhadap pengembangan bidang ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian teori *E-Government* dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa.

F. Literatur Review

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Kurniawan (2017) dengan judul *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis E-Government*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Campurejo dilihat dari indikator aspek kewenangan lokal berskala desa yaitu bidang pemerintahan desa dengan adanya fasilitas internet dalam penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat terbantu melalui website, dari perangkat desa juga sangat terbantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan adanya aplikasi di desa, kemudian di bidang pembangunan desa dengan adanya media social yang dimiliki pemerintah desa memberikan kemudahan masyarakat dalam berinteraksi terkait pemeliharaan lingkungan desa serta cara masyarakat dalam mencari informasi apapun lebih cepat dan mudah dengan fasilitas wi-fi dilingkungan desanya. Selanjutnya bidang kemasyarakatan desa dengan elektronik yang ada Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintah desa dapat memonitoring kondisi desa setiap saat serta dengan keberadaan internet ini dalam hal mediasi desa dengan berbagai pihak lebih efektif dan efisien. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat sendiri dalam pemanfaatan elektronik dalam aspek pertanian sangat terbantu dengan memanfaatkan fasilitas

internet dalam hal jual beli serta pengelolaanya serta pemberdayaan kesenianpun juga memanfaatkan fasilitas internet untuk update seni terbaru. Sedangkan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait *E-Government* fasilitas internet yang ada belum mampu mengcover semua dusun yang ada di Desa Campurejo hanya 3 dusun yang sudah tercover namun sudah direncanakan untuk kedepan semua dusun terfasilitasi jaringan wifi selain itu sumber daya manusia juga mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis *E-Government* karena electron (Kurniawan, 2017)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rokhi Dkk, (2024) dengan judul penelitian *Dampak Implementasi E-Government Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sukajaya*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi egovernment di Sukajaya perlu diperbaiki. Masalah utama di Desa Sukajaya yaitu: (a) kurangnya penggunaan yang signifikan dari layanan digital yang tersedia oleh masyarakat, (b) kepuasan yang meningkat tetapi tidak lengkap karena integrasi digital yang buruk dan upaya sosialisasi yang tidak memadai, dan (c) faktor-faktor pendukung dan menghambat seperti dukungan kebijakan pemerintah dan infrastruktur teknologi yang bertentangan dengan tantangan seperti keterampilan digital yang terbatas dan aksesibilitas. Rekomendasi yang diberikan mencakup meningkatkan integrasi sistem *E-Government* , meningkatkan keterampilan digital komunitas, dan memperkuat kebijakan dukungan teknologi (Hamim et al., 2024)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alfin M. Ardani Dkk, (2024) yang berjudul *Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *E-Government* telah diterapkan secara efektif dan lancar di Desa Kedungasri, Tegaldlimo, Banyuwangi, yang terbukti dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Faktor pendukung pada pelaksanaan *E-Government* yaitu sistem yang lancar dan jaringan lancar sehingga memudahkan akses untuk menggunakan sistem *E-Government* yang ada. Faktor penghambat pada pelaksanaan *E-Government* masyarakat Desa Kedungasri masih banyak yang gagap teknologi dan tidak memiliki handphone. Dalam pelaksanaan *E-Government* di Desa Kedungasri, diharapkan lebih memperbanyak sosialisasi tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar implementasi *E-Government* di Desa Kedungasri berjalan lebih baik lagi. Diharapkan seluruh perangkat desa lebih memaksimalkan lagi untuk melayani masyarakat serta mengikuti pelatihan-pelatihan dengan lebih fokus agar dapat lebih baik lagi melayani Masyarakat (M. Alfin Ardhani, et al...2024)
4. Penelitian yang dilakukan oleh Junior Hendri Wijaya Dkk, (2022) dengan judul penelitian *E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-Government di Indonesia Tahun 2003-2020*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan *E-Government*. Pelaksanaan e-participation dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah

dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, sesuai dengan data yang peneliti dapat dalam EDGI yang menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2020, TII selalu memiliki poin terendah di antara kedua komponen EDGI yang lain, yaitu HCI dan OSI. Campur tangan kekuasaan dalam pemerintah dalam governance dan *E-Government* itu ada, tetapi yang lebih dominan adalah keinginan untuk menjadikan tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Wijaya et al.,2022).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Agus Diana Dkk, (2024). Dengan judul *Kajian Pelaksanaan E-Government pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan *e-Government* pada pemerintahan Desa Citalem belum terlaksana dengan optimal dikarenakan permasalahan Sumber daya manusia yang belum mampu mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi Informatika, sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi dalam upaya memberikan pelayanan melalui *e-Government*, termasuk pengetahuan Teknologi informasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu upaya upaya yang dilakukan pimpinan pemerintahan desa seperti: 1) koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dalam merencanakan pengembangan e-Gov tersebut agar supaya mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaannya; 2) sumber daya aparatur desa harus mendapatkan pendidikan dan latihan terkait teknologi informatika, secara kontinue mengingat teknologi Informatika terus berkembang secara dinamis; 3) adanya motivasi dan

kemauan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui *e-Government* oleh semua pihak didalam pemerintahan desa, maupun pemberian motivasi dari pemerintahan diatasnya. Dengan adanya pengembangan *e-Government* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayan publik bagi masyarakat, menuju pemerintahan yang good governance (Agus Diana et al.,2024).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyana Ermalin Eka Putri Dkk, (2024).

Yang berjudul *Kinerja Pemerintah Dalam Penerapan E-Government Di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*. Hasil dari penelitan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberagung dan pemangku kepentingan terkait di Desa Sumbelagulng dapat merancang strategi yang lebih elfektif dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam penerapan *E-Government*. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektorswasta, *E-Government* dapat terus ditingkatkan untulk memberikan layanan yang lebih efisieln, transparan, dan berkulalitas kepada masyarakat Desa Sumberagung (Ermalin Widiyana Eka Putri et al.,2024)

7. Penelitian yang dilakukan oleh Deandlles Christover Dkk, (2023).

Dengan judul penelitian *Penerapan Konsep-Konsep Digitalisasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagai bentuk penerapan konsep digitalisasi Desa Manunggal Jaya telah mengembangkan dan mengaktifkan website resmi sebagai upaya peningkatkan kualitas

pelayanan publik. Namun, kendala yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang website Desa dan rendahnya partisipasi dalam mengaksesnya. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan edukasi yang terarah kepada masyarakat tentang penggunaan website Desa (Deandlles Christover et al.,2024).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Gunawan Wibikasana Dkk, (2019). Dengan judul *penelitian Implementasi Kebijakan Pelaksanaan E-Government Pada Desa Sayang Kabupaten Sumedang*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan *E-Government* di Desa Sayang masih belum optimal dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Karena perangkat desanya masih belum mengetahui konsep *E-Government* sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, perangkat desa hanya mengetahui penggunaan teknologi komputer dalam memberikan pelayanan namun secara konsep belum mengetahui secara mendalam tentang *E-Government*. Pemerintahan Desa sayang belum efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis *E-Government*. Pemerintahan Desa sayang belum mampu mengadakan situs website sebagai sarana memberikan informasi kepada instansi, organisasi dan masyarakat dikarenakan keterbatasan pengetahuan perangkat, akibat dari pergantian kepala desa dan setengah perangkat desa. Cepat lambatnya evolusi sebuah pemerintahan dari knowledge societymenuju *E-Government* sangat tergantung dari seberapa peka pemerintah dan masyarakatnya dalam membaca tandatanda zaman (tren atau kecenderungan). Dukungan penerapan *E-Government* dalam

pelayanan publik sudah diberikan Pemkab Sleman meski belum optimal, hal ini karena belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus di samping alokasi anggaran yang berbeda-beda di setiap OPD (Wibiksana et al..., 2019)

9. Penelitian yang dilakukan oleh Gatot Susanto Dkk, (2024). Dengan judul penelitian *Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Tondo Kota Palu*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *E-Government* dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Tondo dari beberapa aspek/elemen yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :Support (Dukungan), adanya dukungan dari pemangku kebijakan dalam bentuk Peraturan, Penerapan *E-Government* di Kelurahan Tondo telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 yang dimana mendukung penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintahan Kota Palu. Capacity (Kemampuan/Sumber Daya), Tersedianya Sumber daya finansial yang berasal dari dana APBD dan serta tersedianya fasilitas pendukung yang cukup memadai untuk mendukung penerapan *E- Government* di Kantor Kelurahan Tondo. Value (Nilai/Manfaat), Kehadiran *E-Government* sangat di inginkan oleh masyarakat karena bisa di akses dimana saja dan kapan saja agar masyarakat tidak perlu antri di Kantor Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Namun masih adanya masyarakat lansia (lanjut usia) atau masyarakat yang kurang mengerti gadget atau teknologi dan lebih memilih datang langsung

ke Kantor Kelurahan Tondo dalam pengurusan berkas, serta Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten sehingga dalam penerapan *E-Government* di Kantor Kelurahan Tondo masih sedikit kurang Maksimal (Susanto et al., 2024)

10. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Andrio M. Karaten Dkk, (2024).

Dengan judul penelitian *Pengaruh Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Government* tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru. Ini disebabkan adanya ketimpangan digital, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pemahaman atas sistem pelayanan publik yang baik, adanya resistensi terhadap implementasi *E-Government* di daerah, kurangnya kesadaran masyarakat akan peran e-goverment yang diakibatkan faktor budaya, konflik kepemimpinan pusat dan daerah terhadap penerapan e-goverment, belum adanya pembakuan aturan yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan aturan yang dapat terjadi sewaktu-waktu (Dedy Andrio M Karate et al., 2024)

Novelti dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif dalam mengkaji penerapan *E-Government* pada pemerintah desa, yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika banyak penelitian sebelumnya fokus pada aspek teknis atau infrastruktur dalam penerapan *E-Government* di tingkat pemerintahan pusat

atau daerah, penelitian ini berfokus pada tingkat desa, yang sering kali terabaikan dalam kajian-kajian terkait *E-Government*.

Penelitian ini memperkenalkan perspektif baru dengan meneliti tidak hanya pada aspek teknologi yang digunakan dalam pelayanan publik berbasis *E-Government*, tetapi juga pada dampaknya terhadap kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengembangan aplikasi atau sistem *E-Government* di tingkat kota atau kabupaten, sementara penelitian ini mengangkat isu-isu yang terkait dengan tantangan dan peluang implementasi *E-Government* di desa, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan fokus lebih besar pada faktor manusia, seperti tingkat literasi teknologi aparat desa dan penerimaan masyarakat terhadap sistem *E-Government*, yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam studi-studi terdahulu. Aspek ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, kesiapan aparatur desa dalam mengelola sistem digital, serta respons masyarakat desa terhadap layanan berbasis *E-Government* menjadi elemen penting yang diteliti dalam studi ini, yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada faktor teknis atau infrastruktur semata.

G. Kerangka Konseptual

1. *E-Government*

a. Pengertian *E-Government*

Menurut Bank Dunia dalam (Samodra Wibawa, 2009) *E-Government* adalah penerapan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah, seperti *wide area networks* (WAN), internet, dan mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan antar instansi pemerintah (Wibawa, 2009).

Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi dan Bintoro Wardianto, 2010), *E-Government* adalah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Wardianto, 2010)

Sedangkan Menurut Richardus Eko Indrajit (2005), *E-Government* adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, yang melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. *E-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif. Intinya, *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi untuk

memperbaiki hubungan antara pemerintah dan berbagai pihak lain, seperti masyarakat, pengusaha, dan instansi lainnya (Richardus Eko Indrajit, 2005)

Kemudian menurut Budi Rianto (2012) menyimpulkan bahwa *E-Government* adalah bentuk aplikasi dalam pelaksanaan tugas dan tata kelola pemerintahan yang menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan tersebut terjadi melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang merupakan kolaborasi antara komputer dan sistem jaringan komunikasi (Rianto, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *E-Government* adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan secara efisien.

b. Dasar Pelaksanaan *E-Government*

Terkait dengan penerapan *E-Government* di pemerintah desa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Bab IV Pasal 13 Ayat 1 Huruf a dan b, dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik diwajibkan untuk: 1) Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan 2) Membuat

serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar, sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional

Selanjutnya, hal ini ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional. Pengembangan *E-Government* menjadi "angin segar" bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di sektor pemerintahan. Saat ini, banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang telah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi, khususnya dalam bentuk situs web. Namun, sebagian besar situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tahap pertama (persiapan), dan hanya sedikit yang telah mencapai tahap kedua (pematangan). Sementara itu, tingkat ketiga (pemantapan) dan keempat (pemanfaatan) belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *E-Government* di Indonesia masih berada pada tahap awal, di mana banyak lembaga pemerintah yang mengklaim telah mengaplikasikan *E-Government*, padahal mereka baru mencapai tahap *web presence* saja.

c. Tujuan *E-Government*

Menurut Siallagan dan Machfoedz (2006), secara ringkas, tujuan utama dari implementasi *E-Government* adalah untuk menciptakan pelanggan secara *online*, bukan secara langsung (*in-*

line). *E-Government* bertujuan untuk memberikan pelayanan tanpa intervensi pegawai institusi publik dan tanpa sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan layanan yang sederhana. Selain itu, *E-Government* juga bertujuan untuk mendukung prinsip *good governance*. Penggunaan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga public (Siallagan, H., 2006).

Richardus Eko Indrajit (2005) menyatakan bahwa suatu negara memutuskan untuk mengimplementasikan *E-Government* karena meyakini bahwa penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan akan memberikan berbagai manfaat, di antaranya: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya, 2) Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan, 3) Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, serta 4) Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, pemanfaatan teknologi informasi secara umum ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: 1) *E-Leadership*, yang berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara dalam mengantisipasi serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi; 2) Infrastruktur

Jaringan Informasi, yang mencakup kondisi infrastruktur telekomunikasi, akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses; 3) Pengelolaan Informasi, yang berfokus pada kualitas dan keamanan dalam pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyaluran dan distribusinya; 4) Lingkungan Bisnis, yang mencakup kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan antar masyarakat; serta 5) Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, yang berkaitan dengan difusi teknologi informasi dalam kegiatan masyarakat, baik individu maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Sedangkan Menurut Hadwi Soendjojo (2008), *E-Government* diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa hal. *Pertama*, Layanan Masyarakat, di mana pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat dapat dilakukan, dengan informasi dari pemerintah yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa harus menunggu jam buka kantor pemerintah. Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi dari kantor atau rumah tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintah. *Kedua*, Hubungan antara Pemerintah,

Masyarakat, dan Pelaku Bisnis, di mana terjadi peningkatan hubungan yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, dengan adanya keterbukaan yang dapat menghilangkan rasa ketidakpercayaan dari semua pihak terhadap pemerintah. *Ketiga*, Pemberdayaan Masyarakat melalui Informasi, yang dilakukan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses. Dengan adanya informasi yang cukup, masyarakat akan lebih mudah menentukan pilihan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. *Keempat*, Pelaksanaan Pemerintah yang Lebih Efisien, di mana diharapkan dengan adanya *E-Government*, pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lebih efisien, karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan diskusi antara pemerinta.

d. Penerapan Konsep *E-Government*

Dalam penerapan konsep *E-Government*, terdapat sejumlah faktor penentu yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan tingkat kesiapan suatu daerah dalam mengimplementasikan *E-Government* (Richardus Eko Indrajit, 2005). Selain itu, di dalam instansi pemerintah, faktor-faktor berikut ini juga sangat penting untuk diperhatikan:

- 1) Infrastruktur telekomunikasi, dalam pelaksanaannya, meliputi perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur lainnya yang menjadi faktor sangat penting

dalam penerapan *E-Government*. Secara ideal, infrastruktur yang mendukung pengembangan *E- Government* harus tersedia untuk mencapai target atau prioritas yang telah disepakati. Namun, secara pragmatis, perlu juga mempertimbangkan potensi, kemampuan, atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi yang bersangkutan.

- 2) Tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi (TI) oleh pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah saat ini memanfaatkan berbagai teknologi informasi untuk mendukung kegiatan sehari-hari, yang mencerminkan tingkat kesiapan mereka dalam menerapkan konsep *E-Government*. Meskipun banyak lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana, pinjaman, atau hibah untuk membeli perangkat keras teknologi bagi pemerintah, kenyataannya instrumen tersebut seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tidak dirawat dengan baik, sehingga banyak yang kini dalam kondisi rusak
- 3) Kesiapan sumber daya manusia di pemerintah, yang akan menjadi "pemain utama" atau subjek dalam inisiatif *E-Government*, pada dasarnya merujuk pada pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, tingkat kompetensi dan keahlian mereka sangat mempengaruhi

keberhasilan penerapan *E-Government*. Semakin tinggi tingkat literasi teknologi informasi (IT) pada sumber daya manusia di pemerintah, semakin siap mereka untuk mengimplementasikan konsep *E-Government*.

- 4) Ketersediaan dana dan anggaran sangat penting, karena sekecil apapun inisiatif *E-Government* yang akan diterapkan, hal itu memerlukan sumber daya finansial untuk mendanainya. Pemerintah daerah harus memiliki akses yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang tersedia serta memiliki otoritas untuk mengalokasikannya. Perlu diingat bahwa dana yang dibutuhkan tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga harus mencakup anggaran untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan di masa depan.
- 5) Perangkat hukum sangat penting dalam konsep *E-Government*, karena terkait dengan upaya penciptaan dan pendistribusian data/informasi antar pihak, serta masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual. Hal-hal tersebut perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat memastikan terciptanya mekanisme *E-Government* yang kondusif.

6) Perubahan paradigma, pada dasarnya, penerapan *E-Government* adalah proyek manajemen perubahan yang memerlukan keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berpikir. Perubahan ini akan mengarah pada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan dalam mengubah cara kerja, sikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pimpinan dan pegawai di pemerintahan tidak mau beradaptasi, maka dapat disimpulkan bahwa mereka belum siap untuk menerapkan konsep *E-Government*.

Sedangkan Menurut Inpres RI No. 3 Tahun 2003, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis *E-Government* perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang saling terkait, yaitu: pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau oleh masyarakat luas; kedua, menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah serta pemerintah daerah otonom secara holistik; ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal; keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi serta teknologi informasi; kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik di pemerintahan maupun pemerintah daerah otonom, serta meningkatkan e-literacy masyarakat; dan keenam, melaksanakan pengembangan secara bertahap yang realistik dan terukur.

2. Pemerntintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, yang mungkin disebut dengan istilah lain, dan dibantu oleh Perangkat Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kepala Desa memiliki sejumlah wewenang, yaitu: 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; 3) Mengelola keuangan dan aset Desa; 4) Menetapkan Peraturan Desa; 5) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 6) Mendorong kehidupan masyarakat desa; 7) Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 8) Meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikannya untuk mencapai kemakmuran masyarakat; 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat; 10) Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat; 11) Memanfaatkan teknologi yang tepat guna; 12) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 13) Mewakili desa di pengadilan atau memberikan kuasa hukum sesuai peraturan perUndang-Undangan; dan 14) Melaksanakan wewenang lain yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai aktor dan institusi yang memiliki wewenang serta hak untuk mengatur, mengelola, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tindakan

mengatur dan mengelola memiliki beberapa makna, yaitu: Pertama, mengeluarkan dan melaksanakan peraturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat semua pihak yang berkepentingan. Kedua, bertanggung jawab untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menangani masalah yang muncul. Ketiga, memutuskan dan melaksanakan alokasi sumber daya (seperti dana, peralatan, dan personel) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagikan sumber daya kepada penerima manfaat. Keempat, mengurus berarti melaksanakan, menjalankan, dan merawat pelayanan publik yang telah diatur tersebut.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa memiliki tiga fungsi utama: pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan mencakup pembuatan peraturan mengenai pemanfaatan barang-barang publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya alam. Sementara itu, pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki oleh masyarakat (Eko et al., 2014).

3. Pelayanan Publik

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 2 menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah terwujudnya batasan yang jelas serta hubungan yang terdefinisi antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik:

1. Terwujudnya sistem penyelenggara pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas tujuan pemerintah dan korporasi yang baik;
2. Terpenuhi penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan Asas-asas pelayanan publik menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7 Tahun 2003 terdiri dari enam prinsip penting. *Pertama*, Transparansi, yang berarti pelayanan harus terbuka, mudah diakses, dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. *Kedua*, Akuntabilitas, yang mengharuskan penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah, untuk dapat mempertanggungjawabkan pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. *Ketiga*, Kondisional, yang berarti pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. *Keempat*, Partisipatif, yang mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. *Kelima*, Kesamaan Hak, di mana pelayanan publik tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, atau status ekonomi. *Keenam*, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yang memastikan bahwa dalam proses pemberian pelayanan publik, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi secara seimbang.

Standar penyelenggaraan pelayanan public menurut (Ratminto & Atik, 2004) harus menetapkan standar pelayanan yang jelas dan dipublikasikan sebagai bentuk jaminan kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan ini merupakan ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dipatuhi oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Sedangkan menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan harus mencakup beberapa hal penting, yaitu: *pertama*, Prosedur pelayanan, yang mencakup proses yang dilakukan oleh pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. *Kedua*, Waktu penyelesaian, yang ditetapkan mulai dari pengajuan permohonan hingga penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan. *Ketiga*, Biaya pelayanan, yang mencakup rincian biaya yang ditetapkan dalam proses pemberian

pelayanan, dengan rincian biaya yang jelas, terutama untuk jenis pelayanan yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengajuan. *Keempat*, Produk pelayanan, yang merupakan hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *Kelima*, Sarana dan prasarana, yang mengharuskan penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. *Keenam*, Kompetensi, yang menekankan pentingnya penetapan kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintah dapat dianggap baik jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berfokus pada kepentingan masyarakat dan dapat memberikan kepuasan. Penilaian masyarakat secara langsung terhadap pelayanan yang diterima menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik merupakan sistem dalam pemerintahan yang terus ditingkatkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pelayanan publik mencakup pemberian layanan yang baik kepada masyarakat tanpa diskriminasi, baik itu dalam bentuk jasa, barang, administrasi surat-menyurat, dan berbagai hal lainnya yang merupakan kebutuhan warga. Memberikan pelayanan

yang baik akan menciptakan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas pemerintahan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan secara profesional, akuntabel, dan optimal. Dengan pelayanan yang optimal, diharapkan masyarakat dapat merasakan kualitas pelayanan yang baik dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017)

Metode penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi dengan memahami perilaku individu maupun kelompok dan menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara, mengumpulkan data lewat pengaturan partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam

tema yang diangkat, dan selanjutnya memberikan interpretasi makna dari suatu data (Creswell dalam Sugiyono, 2017)

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2017), observasi adalah proses di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu secara langsung di lokasi penelitian. Dalam observasi ini, digunakan metode pengamatan langsung terhadap suatu objek, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Pengumpulan data dilakukan melalui indra peneliti dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Observasi sering dilakukan ketika informasi tentang masalah yang sedang diteliti masih terbatas. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah tersebut, serta kemungkinan petunjuk untuk menemukan solusi atau pemecahan terhadap masalah yang diteliti.

Observasi yang peneliti lakukan di lokasi penelitian adalah bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kalurahan Widodomartani kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Meskipun pemerintah kalurahan telah menyediakan aplikasi untuk mempermudah pengurusan administrasi secara *online*, peneliti mendapati bahwa sebagian

besar masyarakat masih memilih untuk datang langsung ke kantor kalurahan.

Pagi itu, peneliti tiba di kantor Kalurahan Widodomartani sekitar pukul 09.30 WIB, dan langsung mengamati suasana di sana. Beberapa warga sudah tampak antri di ruang tunggu, membawa berbagai dokumen yang diperlukan untuk mengurus administrasi seperti KTP, KK, dan surat-surat lainnya. Meskipun aplikasi *online* sudah disosialisasikan, mayoritas warga yang datang tetap memilih untuk mengurus keperluannya secara langsung di kantor. Mereka mengungkapkan alasan lebih memilih datang langsung karena merasa lebih yakin dan terbantu dengan adanya petugas yang siap memberikan penjelasan langsung terkait proses administrasi.

Peneliti melihat bahwa di dalam kantor, petugas dengan sigap melayani warga satu per satu. Ada beberapa warga yang tampak ragu-ragu saat mendaftar, mengingat mereka harus mengisi beberapa formulir dan memastikan dokumen yang dibawa lengkap. Petugas dengan sabar membantu menjelaskan prosedur dan memandu mereka untuk melengkapi berkas yang kurang. Meskipun aplikasi untuk mengurus secara *online* tersedia untuk mempermudah proses, banyak warga yang mengaku lebih nyaman dan merasa lebih pasti jika semuanya ditangani langsung di kantor, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi.

Selain itu, beberapa warga juga menyampaikan bahwa mereka lebih percaya jika mengurus administrasi secara langsung karena bisa langsung bertanya jika ada kebingungannya. Mereka merasa aplikasi untuk mengurus secara *online* terkadang membingungkan, terutama bagi yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital. Dari pengamatan peneliti, meskipun sistem aplikasi *online* sudah ada, kehadiran petugas yang memberikan penjelasan langsung dan interaksi tatap muka masih menjadi faktor utama yang membuat masyarakat lebih memilih datang ke kantor kalurahan.

Dengan mengamati situasi ini, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun teknologi sudah dipersiapkan untuk mempercepat proses administrasi, faktor kenyamanan, kepercayaan, dan pemahaman masyarakat masih membuat mereka lebih memilih cara konvensional, yakni datang langsung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan teknologi dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi penggunaan aplikasi untuk mengurus administrasi kependudukan secara *online* untuk administrasi kependudukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun pemahaman mengenai suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2017). Dalam

penelitian ini, peneliti mengkombinasikan dua jenis wawancara, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan wawancara terarah (Kriyantono, 2020). Wawancara mendalam dilakukan dengan cara tanya jawab yang lebih bebas, tanpa mengikuti pedoman pertanyaan yang ketat. Sementara itu, wawancara terarah dilakukan dengan menanyakan hal-hal yang telah dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan pedoman atau daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, melalui proses tanya jawab.

Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam dari informan yang relevan, dengan tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebagai acuan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti otentik yang digunakan oleh peneliti dengan memanfaatkan alat yang tersedia untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara memadai. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, seperti gambaran umum Kalurahan Widodomartani, sejarahnya yang tercatat dalam profil Kalurahan, kebijakan-kebijakan yang berlaku, serta dokumen berupa gambar, seperti foto. Hasil dokumentasi yang terkumpul kemudian diolah

dan dianalisis untuk melengkapi data yang sudah diperoleh melalui metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2017)

Dokumen yang peneliti dapatkan di Kalurahan Widodomartani berupa monografi dan demografi memberikan gambaran penting mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan administratif wilayah tersebut, yang sangat relevan untuk memahami konteks penelitian terkait pelayanan administrasi kependudukan. Dokumen monografi Kalurahan Widodomartani memuat informasi mendalam tentang sejarah, struktur pemerintahan, serta perkembangan sosial dan budaya di wilayah tersebut. Dalam dokumen ini, peneliti dapat menemukan penjelasan mengenai visi dan misi Kalurahan Widodomartani dalam melayani masyarakat, serta data tentang lembaga-lembaga yang ada di kalurahan, termasuk organisasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan

Sementara itu, dokumen demografi memberikan data yang sangat penting terkait jumlah penduduk, distribusi usia, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalurahan Widodomartani. Data ini sangat berguna untuk memahami karakteristik masyarakat yang dilayani, misalnya dengan mengetahui jumlah penduduk yang berusia produktif, jumlah keluarga, serta kebutuhan spesifik terkait administrasi kependudukan, seperti pengurusan KTP, KK, atau akta kelahiran. Selain itu, informasi demografi juga membantu peneliti dalam

menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi, yang penting dalam konteks penerapan layanan administrasi berbasis elektronik.

Selain itu, dokumen lain yang dapat peneliti gambarkan disini adalah terkait Peraturan Daerah (Perda) Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perda ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman, termasuk pengaturan mengenai pelayanan berbasis elektronik. Selain itu, terdapat Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini mengatur tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sleman, termasuk kewajiban perangkat daerah dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan secara elektronik. Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan bagi perangkat daerah di Kabupaten Sleman, termasuk kalurahan, untuk mengimplementasikan sistem *E-Government* dalam pelayanan administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sementara itu, di Kalurahan Widodomartani, peraturan terkait pelayanan administrasi kependudukan secara *online*

hingga saat ini belum ada secara khusus. Meskipun Kalurahan Widodomartani sudah menyediakan layanan administrasi kependudukan berbasis elektronik melalui aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat, peraturan yang mengatur pelaksanaan tersebut masih mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman. Dalam praktiknya, pemerintah kalurahan masih mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kabupaten Sleman untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*E-Government*). Hal ini mencakup aturan tentang bagaimana pemerintah kalurahan harus menyediakan akses layanan administrasi kepada masyarakat melalui platform digital dan bagaimana sistem tersebut harus dikelola secara efektif untuk memastikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi pelayanan.

Meskipun sudah ada aplikasi untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran, tidak adanya peraturan khusus di tingkat kalurahan membuat pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik ini belum sepenuhnya terstruktur dengan jelas dan rinci. Sebagian besar keputusan teknis dan prosedural terkait layanan tersebut masih berlandaskan pada pedoman umum yang tercantum dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman dan Bupati Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah Kalurahan Widodomartani untuk memanfaatkan teknologi dalam

pelayanan publik, masih terdapat ruang bagi pengembangan lebih lanjut terkait peraturan kalurahan yang secara spesifik mengatur tata cara dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan secara *online*. Pembentukan peraturan khusus di tingkat kalurahan akan semakin memperjelas dan memperkuat dasar hukum bagi penerapan *E-Government* di Widodomartani, serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut.

3. Unit Analisi Data

a. Objek Penelitian

Penelitian ini ingin mengetahui terkait Pemerintah Kalurahan Dalam Penerapan Pelayanan Berbasis *E-Government* di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini sering disebut sebagai informan. Informan adalah individu yang memberikan informasi mengenai kondisi dan situasi yang relevan dengan latar penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan dengan ditentukan secara langsung, karena informan tersebut terlibat dalam masalah yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan informasi yang

relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta mampu menyampaikan informasi sesuai dengan situasi dan kondisi latar penelitian (Sugiyono, 2018). Dengan demikian, informan yang dipilih adalah mereka yang dapat memberikan informasi yang mendalam dan sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.

Informan dalam Penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari:

Berikut adalah tabeli informan penelitian

Tabel 1. 1. Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan/ Pekerjaan
1	Heruyono, ST	45	Lurah
2	Taufiq W, SH	55	Carik
3	Evi	32	Pelayanan Administrasi
4	Suryanto	42	Guru Sekolah Dasar
5	Abu Mujiono	75	Petani
6	Sumi	70	Petani
7	Galuh Ayu	27	Karyawan Alfamart
8	Pangung Wanto	57	Buruh
9	Puji Lestari	45	Pedagang
10	Sulistiawati	50	Petani
11	Sri Rahayu	57	Petani
12	Feri	25	Mahasiswa

Sumber: Dokumen Lapangan Peneliti 2025

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif menurut Moleong (2007). Data yang diperoleh dalam bentuk ucapan dan tulisan akan diolah dengan cara mengungkapkannya dalam kata-kata atau kalimat, serta mengklasifikasikan seluruh data dan menghubungkan aspek-aspek yang relevan. Selanjutnya, dalam proses analisis data penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan kerangka analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing atau verification).

a. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah proses untuk memilah data yang penting dan yang tidak penting, serta mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola hubungan antar kategori, dan menarik kesimpulan, sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti maupun pihak lain.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dicatat dalam catatan lapangan, kemudian dianalisis, dideskripsikan, dan direfleksikan (Sugiyono, 2016)

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil dari proses reduksi yang disusun dalam laporan secara sistematis, sehingga mudah dibaca dan dipahami, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagiannya, dan membentuk suatu kesatuan yang utuh (Sugiyono, 2018).

d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2015), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai jenis data dan sumber yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap

BAB II

PROFIL KALURAHAN WIDODOMARTANI

A. Sejarah Kalurahan Widodomartani

Sejarah mengenai Kalurahan Widodomartani berawal dari dua kata yaitu Widodo berarti Selamat/Bagus dan Martani berarti pertanian, jadi kalau digabungkan pengertiannya adalah Kalurahan yang baik untuk pertanian. Kalurahan Widodomartani terbentuk berdasarkan maklumat Sri Sultan HB IX pada tahun 1948 yang selanjutnya pada tahun 1951 Mulai dibentuk Kalurahan Widodomartani yang merupakan gabungan dari tiga kalurahan yaitu, Kalurahan Jeruksari, Kalurahan Dukuhsari, dan Kentisari.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kalurahan Widodomartani bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan telah menetapkan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Penetapan Hari Jadi Kalurahan Widodomartani yaitu pada tanggal 19 April. Oleh karena itu pada masa yang akan datang setiap tanggal tersebut, diperingati sebagai hari jadi Kalurahan Widodomartani.

Ketika terbentuknya Kalurahan Widodomartani, saat itu perangkat kalurahan hanya terdiri dari:

- a. Lurah : Kepala Daerah
- b. Carik : Bagian Umum
- c. Modin : Urusan Agama
- d. Kesejahteraan
- e. Keamanan
- f. Sosial

Selanjutnya Lurah yang pernah memimpin yakni:

- a. Lurah I : Bpk. Purwo Widodo (1951-1990)
- b. Lurah II : Bpk. Suharjo (1990-1990)
- c. Lurah III : Bpk. Lamjai (1991-1998)
- d. Lurah IV : Bpk. Tony Suryanto (2001-2013)
- e. Lurah V : Bpk. Heruyono,ST (2014 Sampai sekarang)

Sehingga dari awal terbentuknya Kalurahan Widodomartani, Kalurahan ini baru dipimpin oleh 5 orang Lurah. Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan kalurahan (SOTK) terbaru saat ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman SOTK.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Widodomartani merupakan Kalurahan di Wilayah Kabupaten Sleman yang berlokasi di ibu Kota Kapanewon Ngemplak, dengan luas wilayah Kalurahan Widodomartani kurang lebih 615Ha. Jarak ke Ibu Kota Kapanewon kurang lebih 100m, sedangkan jarak antara pusat Pemerintahan Kalurahan 28 Widodomartani dengan Ibu Kota Kabupaten Sleman berjarak kurang lebih 15 km, jarak tempuh antara pusat Pemerintahan Kalurahan Widodomartani ke Ibu Kota Provinsi kurang lebih 20 km, dan jarak tempuh antara pusat Pemerintahan Kalurahan Widodomartani ke Ibu Kota Negara kurang lebih 650km. Wilayah Kalurahan Widodomartani

berbatasan langsung dengan Kalurahan-Kalurahan di Kapanewon Ngemplak.

Adapun batas-batas Kalurahan Widodomartani adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kalurahan Bimomartanis
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kalurahan Umbulmartani
3. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kalurahan Wukirsari
4. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kalurahan Selomartani

Kalurahan Widodomartani memiliki dua jenis tanah yaitu tanah sawah atau tanah basah dan tanah kering yang dijadikan sebagai lahan kebun dan pemukiman warga. Dari kedua jenis lahan tersebut sebagian besar digunakan oleh masyarakat untuk berkebun dan bertani. Lahan perkebunan lebih banyak ditanami tanamantanaman seperti singkong, jagung, ubi jalar, sayur-sayuran, cabai, bawang, kunyit dan beberapa tanaman lainnya yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Kemudian, lahan yang digunakan untuk pemukiman cukup luas, karena jumlah jiwa yang ada di Kalurahan Widodomartani cukup banyak yakni 10.176 jiwa.

1. Peta Kalurhan Widodomartani

Gambar 2. 1. Peta Kalurhana Widodmartani



Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

Peta Kalurahan Widodomartani menggambarkan secara visual batas-batas wilayah, letak geografis, serta pembagian administrasi yang ada di kalurahan tersebut. Peta ini memudahkan pemahaman tentang struktur wilayah Kalurahan Widodomartani, yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya peta, berbagai aspek seperti infrastruktur, pelayanan publik, serta potensi pembangunan dapat dianalisis dan dikelola dengan lebih efektif.

Peta Kalurahan Widodomartani mencakup informasi tentang batas wilayah, yang menunjukkan letak kalurahan ini dan perbatasannya dengan kalurahan lain di sekitarnya. Peta ini juga menampilkan sebaran dusun atau padukuhan yang ada di Kalurahan Widodomartani, yang menjadi unit administrasi terkecil dalam pemerintahan kalurahan. Selain itu, peta ini dapat menggambarkan lokasi berbagai sarana dan prasarana penting, seperti jalan utama, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta lokasi-lokasi strategis lainnya. Dengan informasi ini, pemerintah kalurahan dapat merencanakan dan memprioritaskan pembangunan serta pelayanan publik di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Peta Kalurahan Widodomartani juga sangat berguna dalam perencanaan pembangunan, karena dapat menunjukkan area yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti dalam hal perumahan, pertanian, atau sektor ekonomi lainnya. Peta ini juga

membantu dalam pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pembagian Wilayah Kalurahan Widodomartani

Pembagian administratif Kalurahan Widodomartani, Sleman, terdiri dari 19 padukuhan, 31 rukun warga, dan 73 rukun tetangga.

Berikut adalah Tabel Pebagian Wilaya Kalurahan Widodomartani

Tabel 2. 1. Tabel Pembagian Wilayah Kalurahan Widodomartani

No	Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW	Nama Dukuh
1	Banglen	3	1	Sumadiyono
2	Blambangan	4	2	Suryanto
3	Kalijeruk 1	3	1	Drs Yuniawan eko putro
4	Kalijeruk 2	3	1	Tri handoko
5	Ganjuran	2	1	Deni dwi harjanto
6	Klancingan	2	1	Wahadi
7	Jimat	2	1	Trihartono
8	Jangkang	2	1	Saryadi
9	Dalem	4	2	Kismadi
10	Jetis	6	2	Haryono
11	Kabunan	4	2	Kulup jaka umbaran
12	Kemasan	4	2	Lingga gupita
13	Karang	4	2	Suharsono
14	Ngalian	4	2	Sri yulianti
15	Kwadungan	4	2	Nanang sujatmiko
16	Karanganyar	2	1	Joko wiratno SH,MH
17	Pucangan	8	3	Amanda pungky
18	Pondok 1	5	2	Priangga arda priguna
19	Pondok 2	7	2	Suhamto
Jumlah		73	31	

Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

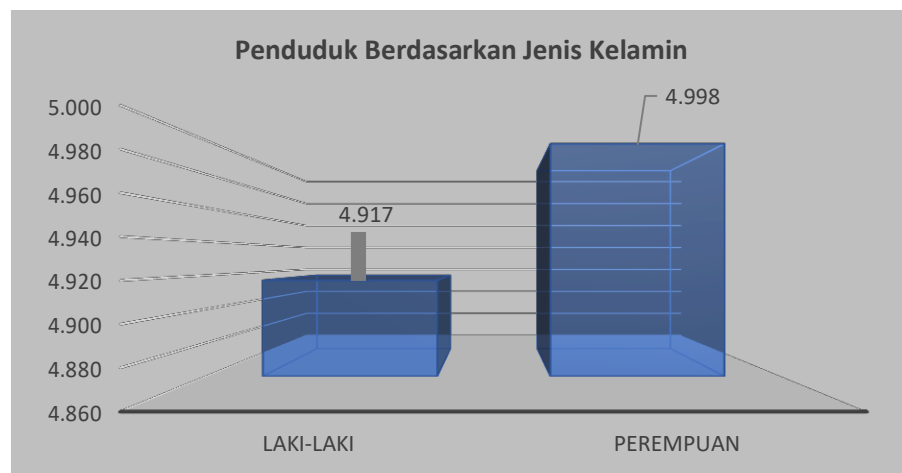
C. Keadaan Demografis

Sampai dengan tahun 2024 Kalurahan Widodomartani memiliki penduduk sebanyak 9.915 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 4.917 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 4.998 jiwa yang terbagi dalam 3.842 Kepala Keluarga (KK). Penduduk Kalurahan Widodomartani tersebar di Wilayah Kalurahan Widodomartani yang terbagi dalam 19 Padukuhaan, 73 Rukun Tetangga, 31 Rukun Warga. Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kalurahan Widodomartani didominasi oleh laki-laki.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah grafik Penduduk Kalurahan Widodomartani berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2. 2. Grafik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

Berdasarkan grafik distribusi penduduk di Kalurahan Widodomartani menurut jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah

penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk di kalurahan ini memiliki proporsi yang cukup merata antara kedua jenis kelamin, dengan sedikit perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan.

Keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan ini dapat mencerminkan adanya kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan di Kalurahan Widodomartani, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Keadaan ini juga menciptakan potensi yang baik bagi pengembangan sosial dan ekonomi, di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kalurahan Widodomartani dapat menjadi faktor yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan peran aktif dari semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam memajukan wilayah ini

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah grafik Penduduk Kalurahan Widodomartani berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2. 3. Grafik . Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

Berdasarkan grafik data jumlah penduduk di Kalurahan Widodomartani menurut tingkat pendidikan, terlihat bahwa tingkat pendidikan SLTP/Sederajat menjadi yang paling dominan dengan jumlah mencapai 7.997 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di kalurahan ini telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama (SLTP) atau setara, yang mencerminkan akses pendidikan yang baik pada tingkat dasar dan menengah.

Angka ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah pertama cukup diakses oleh penduduk Kalurahan Widodomartani, dan merupakan dasar yang penting untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Meskipun

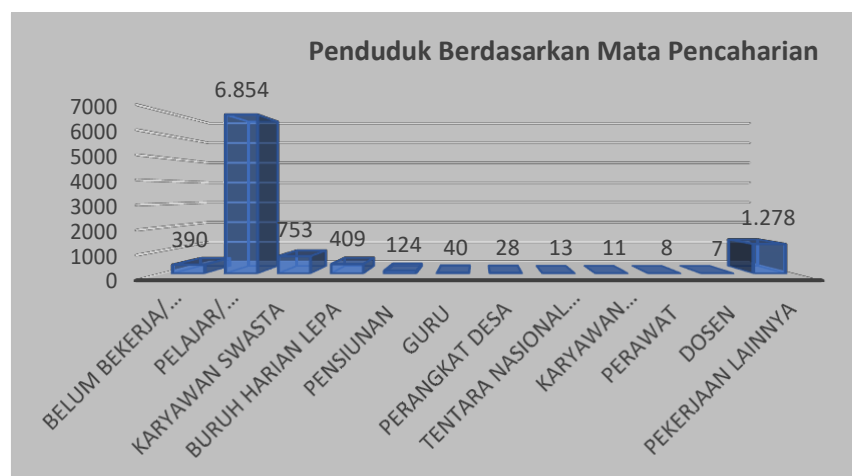
sebagian besar penduduk telah mencapai pendidikan SLTP atau sederajat, masih terdapat peluang untuk meningkatkan angka kelulusan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti SLTA atau bahkan pendidikan tinggi, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalurahan tersebut.

Selain kelompok yang mendominasi ini, terdapat juga penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau lebih rendah, meskipun jumlahnya lebih kecil. Keberagaman tingkat pendidikan ini mencerminkan perbedaan latar belakang pendidikan yang ada di kalurahan, yang dapat menjadi perhatian untuk upaya lebih lanjut dalam meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan di masa depan

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.

Berikut adalah grafik Penduduk Kalurahan Widodomartani berdasarkan Mata Pencaharian.

Gambar 2. 4. Grafik . Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

Berdasarkan grafik distribusi penduduk di Kalurahan Widodomartani menurut mata pencaharian, terlihat bahwa kelompok penduduk yang paling dominan adalah pelajar, dengan jumlah mencapai 6.854 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Widodomartani saat ini sedang menjalani pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Angka ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang menjadi indikasi positif terhadap perkembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

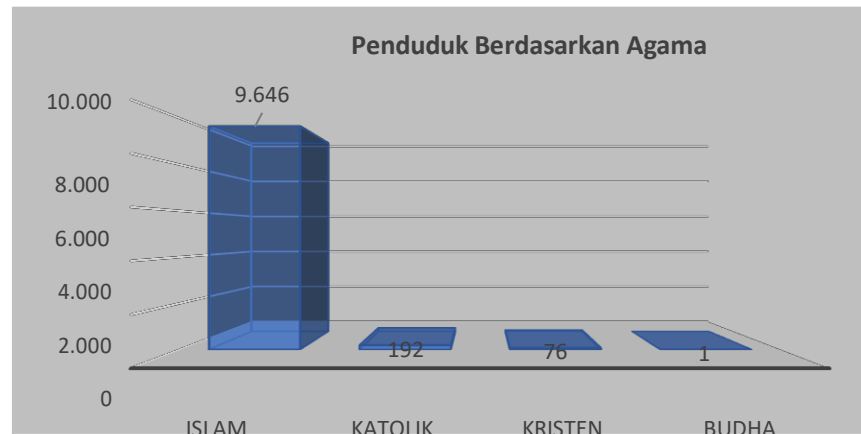
Selain pelajar, terdapat 1.278 jiwa yang terdaftar dalam kelompok pekerjaan lainnya. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan pelajar, angka ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk sudah mulai terlibat dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Dominasi pelajar dalam tabel ini menunjukkan bahwa Kalurahan Widodomartani memiliki fokus yang kuat pada pendidikan, yang diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan perekonomian di masa depan. Dengan lebih banyaknya penduduk yang mengakses pendidikan, Kalurahan Widodomartani berpotensi untuk terus berkembang dan menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.

Berikut adalah grafik Penduduk Kalurahan Widodomartani berdasarkan Agama.

Gambar 2. 5. Grafik Penduduk Berdasarkan Agama



Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

Berdasarkan grafik distribusi penduduk di Kalurahan Widodomartani menurut agama, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam, dengan jumlah mencapai 9.646 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang dominan di kalurahan ini, yang mencerminkan tradisi dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, terdapat juga sejumlah kecil penduduk yang menganut agama Katolik sebanyak 192 jiwa, Kristen sebanyak 76 jiwa, dan Buddha yang hanya berjumlah 1 orang. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, keberagaman agama ini mencerminkan pluralitas yang ada di Kalurahan Widodomartani, dengan adanya keberagaman keyakinan yang dihormati dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Dominasi agama Islam yang signifikan, diikuti dengan keberagaman agama lainnya, menunjukkan bahwa Kalurahan Widodomartani memiliki komposisi agama yang mayoritas homogen, namun tetap membuka ruang bagi pluralisme dan toleransi antar umat beragama. Kehidupan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda ini menjadi salah satu aset penting dalam membangun masyarakat yang rukun dan saling menghargai.

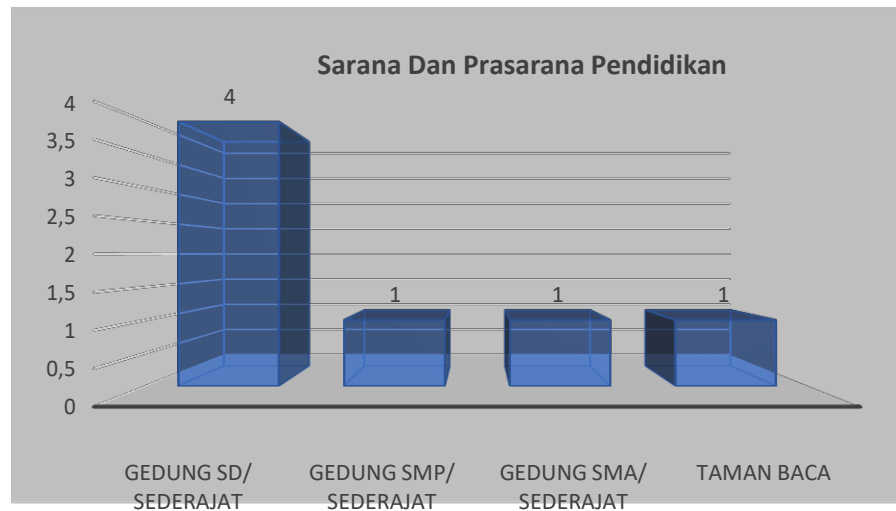
D. Kondisi Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana di suatu kalurahan sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sarana dan prasarana ini mencakup berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ibadah, infrastruktur umum, hingga aspek sosial lainnya.

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berikut adalah grafik Sarana dan Prasarana Pendidikan Kalurahan Widodomartani.

Gambar 2. 6. Grafik Sarana dan Prasarana Pendidikan



Sumber: Profil Kalurahan Widodomaetani 2024

Di Kalurahan Widodomartani, sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai untuk mendukung proses pendidikan di berbagai jenjang. Terdapat beberapa fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta fasilitas tambahan untuk mendukung minat baca.

Untuk tingkat pendidikan dasar, Kalurahan Widodomartani memiliki 4 unit Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di berbagai wilayah, memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan dasar. Di tingkat menengah pertama, terdapat 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang siap melanjutkan pendidikan bagi mereka yang telah lulus dari SD. Untuk jenjang menengah atas, terdapat 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memberikan kesempatan bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat atas, dengan berbagai pilihan untuk mempersiapkan

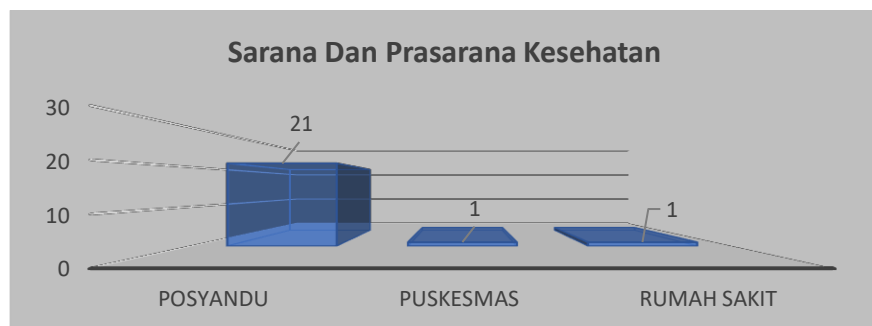
mereka memasuki dunia perguruan tinggi atau dunia kerja setelah lulus.

Selain itu, Kalurahan Widodomartani juga memiliki 1 unit Taman Baca yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan di luar jam sekolah formal. Taman Baca ini memberikan akses bagi warga, terutama anak-anak dan remaja, untuk membaca buku-buku referensi dan literasi yang bermanfaat bagi pengembangan diri.

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Berikut adalah grafik Sarana dan Prasarana Kesehatan Kalurahan Widodomartani.

Gambar 2. 7. Grafik Sarana dan Prasarana Kesehatan



Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

Di Kalurahan Widodomartani, sarana dan prasarana kesehatan telah tersedia dengan baik untuk mendukung kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas kesehatan ini mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari layanan kesehatan dasar hingga layanan yang lebih komprehensif. Untuk layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan mudah dijangkau, terdapat 21

Posyandu yang tersebar di berbagai wilayah. Posyandu ini berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat di tingkat paling dasar.

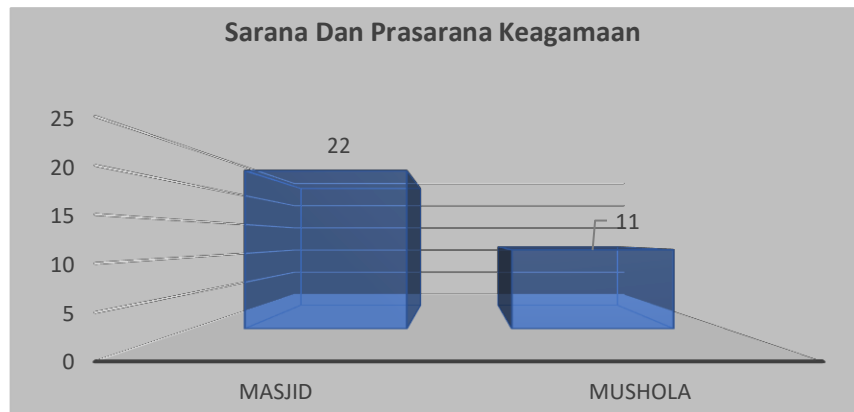
Selain itu, Kalurahan Widodomartani juga memiliki 1 unit Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan lebih lanjut, seperti rawat jalan, pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan, dan layanan medis lainnya. Puskesmas ini berfungsi sebagai fasilitas kesehatan utama yang melayani kebutuhan medis masyarakat setempat, serta memberikan program-program kesehatan preventif dan promotif untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Untuk layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan spesialis, di Kalurahan Widodomartani juga terdapat 1 unit rumah sakit. Rumah sakit ini memberikan pelayanan medis yang lebih lengkap, mulai dari perawatan intensif, operasi, hingga layanan medis spesialis. Keberadaan rumah sakit ini sangat penting untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut dan kompleks, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan.

3. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Berikut adalah grafik Sarana dan Prasarana Keagamaan Kalurahan Widodomartani.

Gambar 2. 8. Grafik Sarana dan Prasarana Keagamaan



Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

Di Kalurahan Widodomartani, sarana dan prasarana ibadah tersedia dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan umat beragama, khususnya umat Islam. Terdapat 21 masjid yang tersebar di berbagai wilayah kalurahan, menyediakan tempat ibadah yang luas dan nyaman bagi masyarakat untuk melaksanakan salat lima waktu, salat Jumat, serta kegiatan keagamaan lainnya. Masjid- masjid ini juga sering menjadi pusat kegiatan keagamaan, seperti pengajian, ceramah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat mempererat tali persaudaraan antar warga.

Selain itu, terdapat 11 mushola yang juga tersebar di wilayah Kalurahan Widodomartani. Mushola-mushola ini berfungsi sebagai tempat ibadah yang lebih kecil namun tetap menyediakan fasilitas untuk melaksanakan ibadah sehari-hari. Keberadaan mushola ini

sangat penting, terutama di area yang lebih jauh dari masjid, sehingga memudahkan warga untuk tetap dapat menjalankan ibadah dengan baik tanpa harus jauh-jauh menuju masjid.

Dengan adanya 21 masjid dan 11 mushola, Kalurahan Widodomartani menunjukkan komitmennya untuk menyediakan sarana ibadah yang memadai bagi umat Islam. Fasilitas ibadah yang tersebar ini tidak hanya mendukung kegiatan ibadah rutin, tetapi juga memperkuat kehidupan beragama di kalurahan tersebut, menjaga keharmonisan sosial, dan mempererat hubungan antar sesama warga.

E. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Widodomartani

1. Visi dan Misi Kalurahan Widodomartani

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kalurahan Widodomartani yang Sejahtera, Aman, Tentram, Mandiri, Agamis yang berbasis pada Sektor Pertanian, Perdagangan, UMKM dan Budaya”

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel.
- 2) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kalurahan untuk memberikan pelayanan yang Prima kepada Masyarakat.

- 3) Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban dalam kehidupan di masyarakat.
- 4) Penguatan Kelembagaan kalurahan sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan cara penguatan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),TK, Perpustakaan Kalurahan, Perpustakaan komunitas dan mendorong anak putus sekolah agar bisa tetap melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan menengah.
- 6) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi sektor kesehatan, diantaranya Poskesdes, Posyandu, Kelompok kader kesehatan, meningkatkan kemitraan dengan Puskesmas dan sektor swasta yang bergerak dibidang kesehatan serta tetap menerapkan budaya PHBSdi masyarakat.
- 7) Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama dengan peningkatan kapasitas lembaga keagamaan yang ada, mengadakan pembinaan kepada warga masyarakat.
- 8) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya yang berkembang di masyarakat.
- 9) Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berbasis pada sektor Pertanian, Perdagangan, UMKM serta

mendorong jalannya Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)

10) Mendorong generasi muda dalam menghadapi era Globalisasi dan modernisasi tanpa meninggalkan budaya serta kearifan lokal yang ada di masyarakat.

11) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Struktur Pemerintahan Kalurahan Widodomartani

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Widodomartani, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, mencakup tiga kategori kelembagaan yang berperan penting dalam tata kelola desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dengan memperhatikan asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah desa, yang dalam beberapa kasus disebut dengan nama lain seperti kepala desa, bertugas mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pamong desa atau

perangkat desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

Sekretariat desa memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, yang dibagi ke dalam tiga urusan utama, yaitu urusan keuangan, urusan perencanaan, dan urusan tata usaha serta umum. Sementara itu, pelaksana teknis terdiri dari tiga seksi, yakni seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Pelaksana kewilayahan dibagi menjadi 19 wilayah yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Struktur organisasi pemerintahan Kalurahan ini disusun secara terstruktur, dengan urutan yang mencerminkan kebutuhan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari Lurah yang bekerja sama dengan BPK dalam membangun pemerintahan Kalurahan yang konsisten, hingga pelayanan masyarakat yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan warga Kalurahan Widodomartani.

Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), menurut Permendagri No. 18 Tahun 2018, adalah wadah partisipasi masyarakat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa. LKD ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta berperan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) adalah lembaga yang mencerminkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. BPK bertugas untuk

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menetapkan peraturan desa bersama Lurah. Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah, dengan proses pemilihan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Di Kalurahan Widodomartani, BPK berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, yang mewakili masyarakat Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang juga ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat.

Berikut adalah Gambar Struktur Pemerintahan Kalurahan Widodomartani:

Gambar 2. 9. Struktur Pemerintah Kalurhan Widodomartani



Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

Berikut adalah Tabel Struktur Pemerintahan Kalurahan Widodomartani:

Tabel 2. 2. Tabel Struktur Pemerintah Kalurahan Widodomartani

No	Nama	Jabatan
1	Heruyono, ST.	Lurah
2	Taufiq Wahyu Widodo, SH.	Carik
3	Eviana Rahmawati	Kaur Tata Laksana
4	Yuda Nurdianto	Kaur Pangripta
5	Sigid Ari Wibowo, SE	Kaur Danarta
6	Susilo Widodo, S. Si	Kasih Kamitua
7	Etty Winarni	Kasih Jagabaya
8	Tri Kogam Maliki, SPd	Kasih Ulu-Ulu
9	Eka Budi Winarta, SH.	Staf
10	Prabowo	Staf
11	Sunardi	Staf
12	Dyah Ekasari	Staf
13	Wartono	Staf
14	Linda Ayu Dwi S	Staf
15	Tauqit Satriyo Wibowo	Staf
16	Ersa Alfrian Wibawa	Staf
17	Sumadiyono	Banglen
18	Suryanto	Blambangan
19	Drs Yuniawan eko putro	Kalijeruk 1
20	Tri handoko	Kalijeruk 2
21	Deni dwi harjanto	Ganjuran
22	Wahadi	Klancingan
23	Trihartono	Jimat
24	Saryadi	Jangkang
25	Kismadi	Dalem
26	Haryono	Jetis
27	Kulup jaka umbaran	Kabunan
28	Lingga gupita	Kemasan
29	Suharsono	Karang
30	Sri yulianti	Ngalian
31	Nanang sujatmiko	Kwadungan
32	Joko wiratno SH,MH	Karanganyar
33	Amanda pungky	Pucangan
34	Priangga arda priguna	Pondok 1
35	Suhamto	Pondok 2

Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani 2024

Kalurahan Widodomartani dipimpin oleh 1 orang Lurah yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di kalurahan tersebut. Sebagai kepala pemerintahan di tingkat kalurahan, Lurah bertugas untuk

merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi jalannya pemerintahan, pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di bawah Lurah, terdapat berbagai Kepala Urusan yang membawahi bidang-bidang tertentu. Kepala Urusan ini bertugas untuk menangani aspek-aspek khusus seperti keuangan, ketatausahaan, dan pelayanan umum, serta mengelola administrasi yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kepala Urusan ini juga berperan dalam membantu Lurah dalam menjalankan tugas-tugas administratif, menyusun anggaran, dan merencanakan kebijakan yang mendukung kelancaran pemerintahan di kalurahan.

Selain itu, terdapat juga Pembantu Lurah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis di berbagai bidang. Pembantu Lurah ini terbagi menjadi beberapa bagian, seperti bidang pemerintahan dan keamanan serta bidang pembangunan dan kemakmuran. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Lurah dapat diterapkan dengan baik di tingkat dusun atau padukuhan. Pembantu Lurah memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kalurahan.

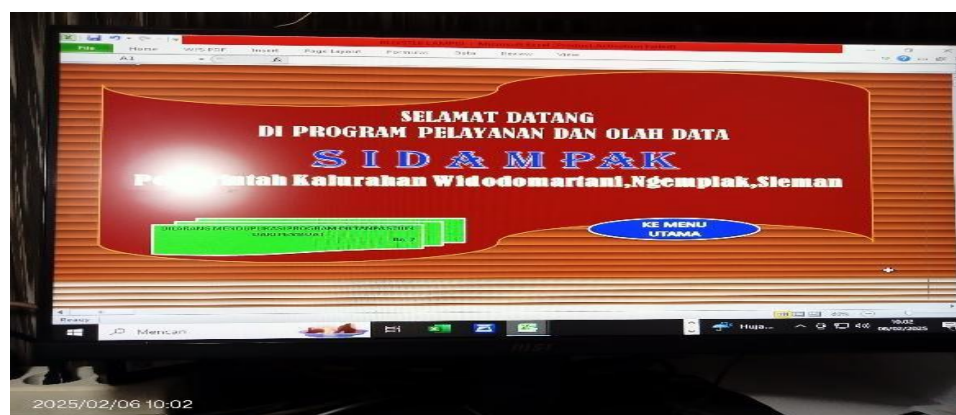
Secara keseluruhan, dengan struktur pemerintahan yang jelas dan terorganisir, Kalurahan Widodomartani dapat menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mengedepankan

partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik. Lurah, bersama dengan jajaran pemerintahannya, berperan penting dalam menciptakan kalurahan yang sejahtera, aman, dan berkembang.

F. Aplikasi Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan (SIDAMPAK)

Aplikasi Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan (SIDAMPAK) Kalurahan Widodomartani merupakan inovasi teknologi yang diterapkan untuk mengelola data kependudukan di tingkat desa. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah mempermudah pemerintah desa dalam mengelola dan mendistribusikan data kependudukan secara lebih terstruktur dan transparan. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi kependudukan bagi warga Kalurahan Widodomartani.

Gambar 2. 10. Aplikasi Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan



Sumber: Data Lapangan Peneliti 2025

3. **Transparansi Layanan Publik:** Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan data kependudukan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan data.

Penggunaan Aplikasi oleh Pemerintah Desa Bagi pemerintah Kalurahan Widodomartani, aplikasi SIDAMPAK memberikan manfaat besar dalam pengelolaan data kependudukan. Pengelolaan data secara digital memungkinkan desa untuk memperoleh informasi yang lebih cepat, akurat, dan terkini. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah desa dapat merencanakan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, seperti dalam pendataan program kesehatan atau bantuan sosial. Data kependudukan yang terkini akan memastikan bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan. Aplikasi ini juga mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, seperti merencanakan pembangunan fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan sarana infrastruktur lainnya. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan evaluasi kebijakan secara berkala untuk mengetahui kebijakan yang kurang efektif.

Manfaat bagi Masyarakat Masyarakat Kalurahan Widodomartani juga merasakan berbagai manfaat dari aplikasi SIDAMPAK. Masyarakat kini dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Mereka dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran dengan lebih cepat dan efisien. Aplikasi ini juga mempermudah warga dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan atau program pemerintah terkait kesejahteraan mereka, seperti bantuan sosial dan akses

pendidikan serta kesehatan yang lebih mudah diakses. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan data, masyarakat merasa lebih aman karena mereka dapat mengetahui bagaimana data mereka digunakan oleh pemerintah desa.

Namun dalam menerapkan aplikasi ini, terdapat juga hambatan dalam Penggunaan Aplikasi Walaupun aplikasi SIDAMPAK Kalurahan Widodomartani memberikan banyak manfaat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

1. Kesenjangan Literasi Digital: Masih banyak warga yang belum familiar atau kurang mahir dalam menggunakan aplikasi berbasis digital, yang dapat menghambat akses mereka terhadap layanan yang disediakan.
2. Akses Internet yang Terbatas: Beberapa daerah di Kalurahan Widodomartani memiliki akses internet yang terbatas, yang menjadi kendala dalam pemanfaatan aplikasi ini.
3. Keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya Manusia: Para petugas yang mengoperasikan aplikasi ini memerlukan pelatihan teknis yang cukup agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Kurangnya pelatihan bisa menyebabkan gangguan dalam pengelolaan data dan pelayanan.
4. Masalah Keamanan Data: Karena aplikasi ini mengelola data pribadi yang sensitif, sistem keamanan yang kuat harus diterapkan untuk melindungi data agar tidak jatuh ke tangan yang salah.

Prospek dan Pengembangan Aplikasi Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, prospek pengembangan aplikasi SID Kalurahan

Widodomartani sangat besar. Dengan pelatihan yang memadai untuk masyarakat dan aparat desa, serta perbaikan infrastruktur internet, aplikasi ini berpotensi menjadi solusi jangka panjang yang efektif untuk pengelolaan data kependudukan yang lebih efisien dan akurat. Aplikasi ini juga dapat diperluas fungsinya untuk melayani sektor lain seperti pemantauan program kesejahteraan sosial, pendataan sektor ekonomi, atau integrasi dengan sistem *E-Government* yang lebih luas. Dengan pengembangan tersebut, aplikasi SIDAMPAK Kalurahan Widodomartani dapat menjadi alat yang lebih komprehensif untuk mendukung berbagai sektor pemerintahan desa.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Aplikasi SIDAMPAK Kalurahan Widodomartani memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola data kependudukan secara terorganisir, efisien, dan transparan. Teknologi ini mempermudah proses administrasi kependudukan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Meskipun ada tantangan seperti kesenjangan literasi digital dan akses internet, aplikasi ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan jika didukung dengan pelatihan, peningkatan infrastruktur, dan sistem keamanan yang memadai. Aplikasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan data kependudukan yang dapat diterapkan di desa-desa lainnya di Indonesia.

BAB III

PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENERAPAN PELAYANAN BERBASIS *E-GOVERNMENT* TERHADAP MASYARAKAT

Di Kalurahan Widodomartani, penerapan Aplikasi Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan (SIDAMPAK) bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan data kependudukan di tingkat desa. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi penduduk, seperti pendaftaran, perubahan data, serta pengurusan dokumen kependudukan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik di kalurahan tersebut.

A. *E-Government* dalam menjalankan pemerintahan yang efektif

E-Government, atau pemerintahan berbasis elektronik, telah menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, termasuk di tingkat kalurahan. Penerapan *E-Government* di Kalurahan Widodomartani bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelayanan publik. Sebelumnya, masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan administrasi yang membutuhkan waktu lama, terutama bagi mereka yang harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Namun, dengan adanya *E-Government*, layanan yang kini bisa diakses secara *online*, seperti pendaftaran KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, pengajuan surat-surat izin, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan lainnya.

Bagi sebagian masyarakat, terutama yang sudah familiar dengan teknologi, *E-Government* membawa kemudahan. Mereka dapat mengakses

layanan dengan cepat dan efisien tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya untuk datang langsung ke kantor pemerintah. Selain itu, sistem ini juga mempercepat proses administrasi, sehingga warga dapat lebih cepat mendapatkan dokumen yang diperlukan.

Namun, meskipun banyak manfaatnya, penerapan *E-Government* juga menghadapi tantangan di kalurahan ini. Beberapa warga, terutama yang lebih tua atau yang tidak terbiasa dengan teknologi, masih merasa kesulitan untuk memanfaatkan sistem ini. Mereka mungkin tidak memiliki perangkat seperti ponsel pintar atau komputer yang mendukung akses ke layanan *online*, atau mereka kesulitan dalam memahami cara penggunaan aplikasi atau *website* yang digunakan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Pemerintah kalurahan bisa menyediakan pelatihan atau pendampingan bagi warga yang belum familiar dengan teknologi, agar mereka tidak merasa tertinggal. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil yang sering kali menghadapi masalah akses internet.

Secara keseluruhan, *E-Government* di Kalurahan Widodomartani memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, perlu ada langkah-langkah lebih lanjut dalam memberikan akses yang lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang masih kesulitan dengan teknologi. Pemerintah kalurahan diharapkan dapat

terus mengembangkan sistem ini dengan memperhatikan inklusivitas dan memastikan bahwa teknologi benar-benar dapat diakses oleh semua warga tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan ditemukan bahwa Pemerintah Kalurahan Widodomartani, Bagaimana *E-Government* dalam menjalankan pemerintahan yang efisien.

Hasil wawancara dengan Lurah Kalurahan Widodo Martani yakni bapak Heruyono ST. sebagai berikut:

Beliau Salaku Lurah mengungkapkan bahwa penerapan *E-Government* telah memberikan perubahan signifikan dalam cara pemerintah desa memberikan layanan kepada masyarakat.

"Sebelum ada sistem digital, proses administrasi di desa cukup memakan waktu dan tenaga. Sekarang, dengan adanya sistem *E-Government*, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan surat atau layanan lainnya secara *online*, yang mengurangi antrian dan mempercepat proses. Namun, ia juga mencatat bahwa implementasi *E-Government* masih menghadapi beberapa tantangan, seperti terbatasnya akses internet di beberapa wilayah desa yang lebih terpencil. "Masih ada beberapa wilayah yang kesulitan mengakses layanan *online* karena jaringan internet yang terbatas," tambahnya. Kepala Desa menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur." **(Wawancara 13 Januari 2025)**

Namun dari sisi Masyarakat Kalurahan Widodomartani Berbagai pendapat yang disampaikan oleh masyarakat terkait Bagaimana *E-Government* dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Ada dua pendapat masyarakat yakni yang sudah menguasai teknologi dan tidak menguasai teknologi.

Hasil wawancara dengan beberapa informan dari Masyarakat sebagai berikut:

Ibu Galuh Ayu, usia 27 tahun salah satu karyawan Alfamart "saya sangat mendukung penerapan secara *online* yang diterapkan di Kalurahan Widodomartani. Sebagai seseorang yang sudah menguasai teknologi, saya merasakan manfaatnya dalam banyak hal. Misalnya, jika dulu saya harus datang langsung ke kantor kalurahan untuk mengurus administrasi kependudukan saya pada saat melamar kerja, ternyata bisa dilakukan secara *online*. Saya bisa mengakses layanan lebih cepat, tanpa harus meninggalkan pekerjaan saya. Dengan adanya sistem *online* ini, waktu dan biaya yang biasanya terbuang untuk perjalanan bisa lebih efisien. Ini jelas membantu pemerintahan kalurahan menjadi lebih efektif, karena pelayanan publik bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan transparan." (**wawancara 7 Januari 2025**)

Hal yang sama juga disamoaikan Bapak Suryanto usia 42 tahun sebagai Guru Sekolah Dasara sebagai berikut.

"Menurut saya, penerapan pelayanan administasi kependudukan berbasis *online* di Kalurahan Widodomartani membawa banyak kemudahan. Sebagai seseorang yang terbiasa menggunakan teknologi, saya merasa sangat terbantu. Misalnya, untuk mengurus administrasi seperti KTP, surat izin, atau Akta Kelahiran anak, saya cukup mengakses melalui aplikasi yang telah disediakan tanpa perlu mengantre panjang di kantor kalurahan. Hal ini tentu saja mempercepat proses dan mengurangi beban administrasi. Bagi saya, ini adalah langkah positif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan terbuka." (**Wawancara tanggal 9 Januari 2025**)

Namun pandang ini berbeda dengan masyarakt kalurahan widodomartani yang belum mampu mengakses teknologi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

Bapak Panggung Wanto, Usia 57 tahun, bekerja sebagai buruh mengatakan bahwa "Saya tidak begitu paham dengan teknologi. Saya hanya tahu kalau sekarang banyak hal yang sudah diurus secara *online* misalnya, untuk membuat KTP katanya bisa dilakukan lewat HP. Tapi saya sendiri tidak punya HP yang bisa digunakan untuk itu. Kalau harus datang langsung ke kantor pemerintah, saya masih bisa, tapi kalau hanya bisa lewat HP, saya kesulitan.

Saya merasa ini jadi masalah bagi orang-orang yang seperti saya yang tidak tahu cara menggunakan teknologi." (**Wawancara 7 Januari 2025**)

Sementara itu Ibu Puji Lestari Usia 45 tahun yang bekerja sebagai pedagang mengatakan bahwa:

Ibu Puji Lestari mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sistem pelayanan *online* yang diterapkan di desanya. "Sebagai pedagang, saya tidak punya banyak waktu untuk mengurus administrasi. Saya berharap pelayanan pemerintah kalurahan secara *online* bisa mempermudah urusan saya, tapi kenyataannya malah membuat saya kehilangan banyak waktu. Aplikasi sering mengalami kesalahan dan tidak bisa diakses, sementara kami tidak bisa mendapatkan bantuan langsung dari petugas karena semuanya berbasis aplikasi," ujarinya. Ibu Puji Lestari merasa bahwa sistem ini tidak membantu pekerjaannya, malah menghambatnya. (**Wawancara 9 Januari 2025**)

Sedangkan itu ibu Sulistiawati 50 tahun bekerja sebagai petani berpendapat bahwa

Ibu Sulistiawati juga menyampaikan pendapat serupa terkait pelayanan administrasi kependudukan berbasis *online* yang diterapkan di desa mereka. "Saya pikir teknologi bisa mempermudah semuanya, tapi ternyata malah bikin repot. Aplikasi yang digunakan untuk mengurus administrasi sering error, dan ketika ada masalah, tidak ada solusi cepat dari petugas. Saya merasa, alih-alih lebih cepat, prosesnya justru jadi lebih lama. Untuk urusan seperti KTP atau KK, saya lebih memilih datang langsung karena lebih pasti dan tidak menunggu lama," ujarinya. Ibu Rina merasa bahwa meskipun niat untuk mempermudah administrasi ada, kenyataannya *E-Government* malah menambah beban bagi warga. (**Wawancara 9 Januari 2025**)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abu Mujiono, Usia 75 tahun, bekerja sebagai petani sebagai berikut:

"Saya dengar sudah ada layanan yang bisa diakses secara *online*, tapi saya sendiri tidak bisa menggunakannya. Saya tidak punya HP pintar, dan bahkan kalau ada yang mengajari, saya masih bingung bagaimana cara mengaksesnya. Dulu kalau ingin mengurus sesuatu, saya cukup datang ke kantor pemerintah, tapi sekarang sudah bisa lewat HP urus secara *online*. Saya merasa bahwa ini menyulitkan bagi kami yang tidak tahu cara menggunakannya."

Hal yang sama Kembali diafirmasi oleh Ibu Sumu, Usia 70 tahun, bekerja sebagai petani sebagai berikut:

"Saya tidak tahu banyak soal itu. Dulu saya terbiasa datang ke kantor untuk mengurus berbagai hal, seperti pembuatan surat-surat. Sekarang, katanya harus dilakukan lewat HP atau internet. Saya memang tidak punya HP yang bisa dipakai untuk itu, dan saya juga tidak tahu cara menggunakannya. Bagi orang-orang seperti saya, kalau harus urus secara *online* bagi saya tidak membantu. Saya lebih nyaman dengan cara lama yang langsung bertatap muka dan berbicara dengan petugas." (Wawancara tanggal 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulsksn bahwa: Meskipun *E-Government* seharusnya dirancang untuk membuat pemerintahan lebih efektif, kenyataannya penerapannya di lapangan tidak berjalan dengan baik. Aplikasi yang digunakan sering mengalami kendala teknis, kesulitan akses, dan tidak ramah bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Hal ini justru merugikan warga desa yang mengandalkan sistem administrasi yang lebih mudah dan langsung.

B. *E-Government* dalam menjalankan pemerintahan yang efisien

Penerapan *E-Government* di Kalurahan Widodomartani diharapkan perubahan signifikan dalam cara pemerintahan menjalankan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. *E-Government* di kalurahan ini diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang lebih efisien, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan dan mempercepat proses-proses administratif.

Sebelum adanya *E-Government*, masyarakat di Kalurahan Widodomartani harus mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan atau izin dengan cara konvensional, yang biasanya memerlukan waktu yang lama, antrean Panjang. Namun, dengan diterapkannya sistem *E-Government*, layanan yang kini dapat diakses secara *online*, mulai dari pendaftaran KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian maupun pengajuan izin usaha, hingga pengurusan administrasi lainnya. Masyarakat tidak lagi perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk datang langsung ke kantor kalurahan, karena layanan yang ada dapat diakses dengan mudah melalui perangkat teknologi seperti komputer atau ponsel pintar.

Hal ini tentu membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Namun pada kenyataannya, penerapan pelayanan secara *online* ini malah masih ada tantangan dalam implementasinya.

Masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, terutama yang berusia lebih tua, kesulitan mengakses layanan yang disediakan secara *online*. Mereka mungkin tidak memiliki perangkat yang mendukung atau tidak memahami cara menggunakan aplikasi yang digunakan pemerintah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua warga dapat memanfaatkan *E-Government* dengan baik, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut, serta pelatihan literasi digital untuk masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, ditemukan bahwa Pemerintah Kalurahan Widodomartani terkait bagaimana *E-Government* dalam menjalankan pemerintahan yang efisien Belum berjalan dengan sepenuhnya.

Hasil wawancara dengan Carik Kalurahan Widodomartani yakni Bapak Taufiq W, SH. sebagai berikut:

"Sebagai Carik, saya merasa sangat terbantu dengan adanya *E-Government*. Sistem ini memudahkan kami dalam mengelola data administrasi secara lebih terorganisir dan rapi. Dulu, pengelolaan berkas-berkas administrasi sering kali memakan waktu lama, karena semuanya masih berbasis kertas dan memerlukan pengecekan manual. Kini, dengan sistem digital, semuanya lebih cepat diproses. Misalnya, untuk pembuatan surat keterangan atau izin usaha, semua data sudah tersimpan di dalam sistem yang bisa diakses kapan saja tanpa harus membuka tumpukan berkas fisik. Hal ini membuat pekerjaan kami jauh lebih efisien dan mengurangi potensi kesalahan administratif."

Namun dari sisi masyarakat kalurahan Widodomartani sendiri, ada jawaban yang berbeda terkait efisien pelayanan berbasis *E-Government* yakni dari Masyarakat yang sudah mampu menggunakan teknologi dengan baik dan belum bahkan tidak tahu sama sekali sebagai berikut:

Berkaitan dengan Efisien pelayanan *E-Government*, Bapak Suryanto, Usia 42 tahun, sebagai Guru Sekolah Dasar mengatakan sebagai berikut "Saya sangat mendukung penerapan *E-Government* di Kalurahan Widodomartani. Sebagai seseorang yang sudah terbiasa menggunakan teknologi, saya merasa *E-Government* mempermudah banyak hal, terutama dalam mengakses layanan administrasi. Dulu, untuk membuat KTP atau izin usaha, saya harus datang langsung ke kantor kalurahan dan menghabiskan waktu berjam-jam. Sekarang, saya bisa melakukan semua itu secara *online*, tanpa harus meninggalkan pekerjaan saya. Selain itu, prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih terorganisir. Bagi saya, ini jelas membuat pemerintahan kalurahan lebih efisien karena layanan bisa berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan birokrasi yang rumit."

Pernyataan dari narasumber sebelumnya yang cukup menguasai perkembangan teknologo berbeda dengan Masyarakat Kalurahan Widodomartani yang belum menguasai teknologi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

Ibu Sumu, usia 70 tahun, bekerja sebagai petani mengatakan bahwa "Saya tidak terlalu paham dengan pelayanan *online*. Dulu saya hanya datang ke kantor kalurahan untuk mengurus hal-hal seperti KTP atau surat keterangan. Sekarang katanya bisa dilakukan lewat HP atau internet, tapi saya tidak punya HP yang bisa digunakan untuk itu. Bahkan, saya tidak tahu bagaimana caranya mengakses layanan tersebut. Saya merasa kesulitan, karena saya sudah tua dan tidak begitu paham teknologi. Jadi, bagi saya, secara *online* tidak membantu bagi orang tua seperti saya. (Wawancara 7 Januari 2025)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Panggung

Wantoro, usia 57 tahun sebagai buruh mengatakan bahwa:

"Saya mendengar banyak orang berbicara kalau urusan KTP di sekarang sudah bisa *online*, tapi saya tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Saya memang punya ponsel, tapi ponsel saya bukan yang pintar dan tidak bisa dipakai untuk akses layanan *online*. Jadi, saya lebih memilih datang langsung ke kantor kalurahan jika ingin mengurus sesuatu. Bagi saya datang ke langsung ke kantor kalurahan lebih mudah, saya bisa tanya langsung ke petugas daripada melalui *online*. (Wawancara 9 Januari 2025)

Pernyataan yang sama kebalikan diafirmasi oleh Bapak Abu Mujiono,

usia 75 tahun, bekerja sebagai petani sebagai berikut:

"Saya tidak terlalu paham apa itu pelayanan *online*. Dulu, jika saya perlu mengurus administrasi seperti KTP atau surat-surat lainnya, saya datang ke kantor kalurahan dan langsung bertemu petugas. Sekarang katanya semua bisa dilakukan lewat HP, tapi saya tidak punya HP yang bisa dipakai untuk itu, dan saya juga tidak tahu cara mengaksesnya. Jadi, saya rasa pelayanan *online* tidak membantu saya dalam hal ini, karena saya lebih nyaman dengan cara yang dulu." (Wawancara 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah Kalurahan Widodomartani dan beberapa masyarakat, dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Government* belum memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan. Masyarakat yang belum menguasai teknologi, seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber, penerapan *E-Government* justru menjadi kendala. Mereka yang tidak terbiasa dengan

teknologi atau tidak memiliki perangkat yang memadai merasa kesulitan dalam mengakses layanan yang sudah beralih ke platform digital. Bagi mereka, sistem yang seharusnya mempermudah malah memperburuk keadaan, karena mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi atau situs yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan digital perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kalurahan Widodomartani untuk memastikan semua warga dapat merasakan manfaat dari *E-Government*.

C. *E-Government* dalam menjalankan pemerintahan yang interaktif

Penerapan *E-Government* di Kalurahan Widodomartani dalam menciptakan pemerintahan yang lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah kalurahan dapat lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat, memperluas ruang partisipasi publik, serta meningkatkan keterlibatan warga dalam berbagai proses pemerintahan.

Melalui *E-Government*, warga Kalurahan Widodomartani kini dapat lebih aktif dalam memberikan masukan, kritik, dan saran terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kalurahan.

E-Government juga diharapkan dapat memperkuat transparansi dalam penyampaian informasi. Pemerintah Kalurahan Widodomartani dapat dengan mudah menginformasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan melalui media digital, yang dapat diakses oleh seluruh warga kapan saja. Misalnya, pengumuman terkait administrasi kependudukan, perubahan regulasi, atau

pelaksanaan musyawarah kalurahan bisa langsung disebarakan melalui platform *online*. Cara tersebut dapat memungkinkan warga untuk lebih cepat mendapatkan informasi, yang sebelumnya mungkin memerlukan waktu lebih lama jika hanya mengandalkan cara konvensional seperti papan pengumuman atau surat kabar lokal.

Lebih jauh lagi, *E-Government* juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi program-program pemerintahan. Dengan adanya sistem *online* yang memungkinkan warga untuk mengikuti musyawarah atau rapat perencanaan secara virtual, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktif berkontribusi dalam merancang dan mengawasi program-program yang ada.

Namun dalam pelaksanaan *E-Government* di Kalurahan Widodomartani, khususnya dalam hal interaksi dengan masyarakat, masih terkendala beberapa faktor. Meskipun ada upaya untuk menerapkan sistem berbasis elektronik, banyak warga yang belum memahami cara menggunakan aplikasi untuk administrasi kependudukan, seperti pengurusan KTP atau KK secara *online*. Akibatnya, mereka lebih memilih datang langsung ke kantor kalurahan. Selain itu, terbatasnya akses internet dan perangkat yang mendukung penggunaan aplikasi juga menjadi hambatan. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan sistem ini memperburuk situasi. Untuk meningkatkan interaktif *E-Government*, dibutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat, perbaikan infrastruktur digital, dan dukungan teknis yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan ditemukan bahwa Pemerintah Kalurahan Widodomartani, Bagaimana *E-Government* dalam menjalankan pemerintahan yang interaktif.

Hasil wawancara dengan Ibu Evi sebagai seksi pelayanan Kalurahan Widodomartani sebagai berikut:

"*E-Government* telah mengubah cara kami melayani masyarakat. Dulu, untuk mendapatkan layanan administrasi seperti surat keterangan atau pendaftaran, masyarakat harus datang langsung ke kantor kalurahan. Sekarang, mereka bisa mengakses layanan ini secara *online* melalui aplikasi. Ini mempermudah mereka untuk mengajukan permohonan atau pertanyaan tanpa harus datang ke kantor kami. Selain itu, kami juga lebih mudah untuk memberikan update kepada masyarakat tentang status permohonan mereka. Dengan cara ini, kami bisa menjaga komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan lebih cepat, yang pada gilirannya mempercepat proses administrasi dan pelayanan kami."

Pernyataan yang sama terkait Bagaimana *E-Government* dalam membentuk pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan yang interaktif juga disampaikan oleh Masyarakat yang sudah menguasai teknologi dan belum menguasai teknologi sebagai berikut:

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh mas Feri, usia 25 tahun, bekerja sebagai seorang mahasiswa mengatakan sebagai berikut:

"*E-Government* di Kalurahan Widodomartani sangat membantu kami dalam berinteraksi dengan pemerintah. Sebagai seseorang yang sudah familiar dengan teknologi, saya merasa sangat terbantu dengan adanya sistem *online* ini. Informasi mengenai berbagai kegiatan dan kebijakan kalurahan dapat saya akses kapan saja melalui website atau aplikasi yang disediakan. Kami juga bisa menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan secara langsung, yang kemudian bisa langsung dijawab oleh pihak pemerintah. Dengan adanya sistem ini, saya merasa lebih terlibat dalam proses pemerintahan dan lebih mudah memberikan masukan atau ide yang bisa membantu memperbaiki layanan. Selain itu, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah jadi lebih cepat dan efisien, karena tidak perlu menunggu waktu lama atau datang jauh-jauh ke kantor kalurahan."

Sedangkan Masyarakat Kalurahan Widodomartani yang belum mengasai teknologi mempunyai pendapat yang berbeda, yang mana dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

Ibu Sri Rahayu, Usia 57 tahun, yang bekerja sebagai petani mengatakan bahwa "Saya tahu bahwa sekarang semuanya bisa dilakukan lewat HP, tapi saya sendiri tidak begitu paham cara menggunakannya. Saya hanya memiliki ponsel biasa, dan itu tidak bisa mengakses layanan *online* yang disediakan. Jadi, jika ada pengumuman atau informasi penting, saya harus menunggu sampai ada orang yang memberitahunya atau melihat pengumuman di kantor kalurahan. Saya rasa, untuk orang seperti saya yang tidak mengerti teknologi, *E-Government* tidak membantu banyak dalam hal interaksi dengan pemerintah."

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sumi, Usia 70 tahun, yang bekerja sebagai petani mengatakan bahwa:

"Saya dengar adanya informasi yang bisa di akses secara *online*, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalau saya ingin tahu sesuatu dari pemerintah kalurahan, saya lebih suka datang langsung ke kantor tanya langsung ke petugas atau tanya langsung ke dukuh di tempat saya. Kalau misalnya harus lewat HP, bagi saya itu tidak adil karena saya tidak bisa gunakan HP makanya saya lebih suka cara lama yang lebih langsung dan mudah. (Wawancara 7 Januari 2025)

Bapak Abu Mujiono, Usia 75 tahun, yang bekerja sebagai petani juga mengatak demikian

Saya tidak begitu mengerti apa itu informasi online. Dulu, kalau saya ingin tanya informasi tentang saya datang langsung ke kantor lurah atau tanya langsung ke dukuh saya pas dia pulang kantor. Sekarang, katanya ada sistem *online*, tapi saya tidak punya HP pintar atau internet untuk mengaksesnya. Kalau ada informasi baru atau pengumuman, saya masih mengandalkan cara lama, datang langsung atau mendengar dari tetangga. Jadi, saya tidak merasakan adanya perubahan yang signifikan dalam hal interaktivitas, karena saya tidak tahu cara menggunakan teknologi itu."

Ibu Puji Lestari Usia 45 tahun yang bekerja sebagai pedagang juga mengatakan bahwa:

Ibu Puji Lestari menilai bahwa *E-Government* hanya membantu pemerintah kalurahan saja, tapi tidak dengan masyarakatnya. *E-Government* yang seharusnya membuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat lebih mudah, malah menjadi tidak efektif. Ketika saya ingin mengajukan pertanyaan atau laporan, sering kali tidak ada respons yang jelas atau cepat dari sistem. Padahal, jika menggunakan cara manual, kita bisa langsung berbicara dengan petugas yang memberikan penjelasan secara langsung, mana dari itu kalau ada informasi yang ingin saya tanyakan saya langsung datang ke kantor kalurahan.". Menurutnya, aplikasi atau sistem yang ada tidak cukup interaktif karena minimnya komunikasi dua arah yang terjadi antara pemerintah dan Masyarakat maka dari itu sa. **(Wawancara 9 Januari 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah Kalurahan Widodomartani dan beberapa masyarakat, dapat disimpulkan bahwa implementasi *E-Government* dalam membentuk pemerintahan yang komunikatif di Kalurahan Widodomartani belum berjalan maksimal. Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, interaksi yang diharapkan antara pemerintah kalurahan dan masyarakat melalui platform digital masih terkendala oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi dan aplikasi yang disediakan, serta keterbatasan infrastruktur digital di wilayah tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat juga menjadi penghambat dalam memaksimalkan penggunaan sistem *E-Government*.

Hal ini menunjukkan bahwa *E-Government* di Kalurahan Widodomartani belum sepenuhnya menciptakan komunikasi yang efektif dan

interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih komunikatif dan responsif, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, memperbaiki infrastruktur digital, serta memberikan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai bagi warga dan petugas kalurahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun *E-Government* seharusnya dirancang untuk membuat pemerintahan lebih efektif, kenyataannya penerapannya di lapangan tidak berjalan dengan baik. Aplikasi yang digunakan sering mengalami kendala teknis, kesulitan akses, dan tidak ramah bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Hal ini justru merugikan warga desa yang mengandalkan sistem administrasi yang lebih mudah dan langsung.
2. *E-Government* belum efektif dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan. Masyarakat yang tidak menguasai teknologi kesulitan mengakses layanan digital, sehingga sistem yang seharusnya mempermudah justru memperburuk keadaan. Kesenjangan digital perlu diperhatikan agar semua warga dapat merasakan manfaat E-Government.
3. Implementasi *E-Government* belum maksimal dalam membentuk pemerintahan yang komunikatif. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, interaksi digital terkendala oleh kurangnya pemahaman teknologi, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan. Untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif, perlu ada peningkatan pemahaman teknologi, perbaikan infrastruktur, dan dukungan pelatihan bagi masyarakat dan petugas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik di Kalurahan Widodomartani sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Aplikasi dan Penguatan Infrastruktur Teknologi

Untuk memastikan penerapan E-Government berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembaruan dan perbaikan pada aplikasi yang digunakan, agar lebih ramah pengguna dan minim kendala teknis. Selain itu, pemerintah harus memperkuat infrastruktur digital, seperti penyediaan jaringan internet yang lebih stabil dan perangkat yang memadai, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses layanan dengan lancar.

2. Program Pelatihan dan Sosialisasi Teknologi untuk Masyarakat

Mengingat sebagian besar masyarakat belum menguasai teknologi, penting untuk menyelenggarakan program pelatihan yang rutin agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan *E-Government* secara optimal. Sosialisasi penggunaan aplikasi atau platform digital kepada masyarakat juga harus diperluas, terutama untuk mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, agar mereka merasa lebih nyaman dalam mengakses layanan pemerintah secara digital.

3. Meningkatkan Interaksi dan Komunikasi Dua Arah antara Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui saluran-saluran yang lebih interaktif, seperti forum *online* atau aplikasi

pengaduan yang memudahkan warga untuk memberikan masukan atau keluhan. Selain itu, pemerintah harus aktif menyebarkan informasi mengenai manfaat dan cara penggunaan *E-Government* melalui berbagai media, seperti media sosial, papan pengumuman di desa, dan pertemuan tatap muka, agar masyarakat lebih memahami dan terlibat dalam sistem pemerintahan berbasis digital

DAFTARPUSTAKA

- Agus Diana, B., Sunarya, A., & Harta, R. (2024). Kajian Pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 181–194. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3032>
- Ardhani M Dimas Imaniar, A. W. (2024). IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM PELAYANAN PUBLIK. *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 209–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v4i3.1181>
- Deandlles Christover, Aji Syarif Hidayattulah, & Indah Mawarni. (2023). Penerapan Konsep-Konsep Digitalisasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(2), 199–214. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i2.73>
- Dedy Andrio M Karatem, Cecilia Engko, L. G. L. (2024). *Pengaruh penerapan E-Government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kepulauan aru*. 6(3), 31–42. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1108>
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). *Developing Villages in Indonesia* (Cetakan Pe). Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD).
- Ermalin Widiyana Eka Putri, E. S. (2024). Kinerja Pemerintah Dalam Penerapan *E-Government* Di Desa. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 03(03). <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i3.2543>
- Hamim, R. N., Meidiana, A., Helmi, C., & Nurdin, N. (2024). Dampak Implementasi *E-Government* Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik di Desa Sukajaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 1–16. <https://doi.org/10.47134/par.v1i3.2800>
- Kurniawan, R. (2017). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis E-Government* [Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD"

Yogyakarta]. <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/244>

Rianto, B. (2012). *Polri dan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Putra Media Nusantara.

Richardus Eko Indrajit. (2005). *E-Government In Action*. Andi Offset.

Siallagan, H., dan M. M. (2006). *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas laba, dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi IX.

Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kebijakan* (S.Y. Ratri (ed.);ke-1 Alvabeta CV Diakses 28/11/2024

Susanto, G., Hattab, S., & Guru Besar, D. /. (2024). Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Tondo Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 61–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1191>

Wardianto, F. S. dan B. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara*. Graha Ilmu.

Wibawa, S. (2009). *Adminidtrasi Negara:Isu-isu Kontenporer*. Graha Ilmu.

Wibiksana, I. G. (2019). Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *E-Government* di Desa Sayang Kabupaten Sumedang. *JURNAL AGREGASI: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 7(1), 91–110. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i1.1697>

Wijaya, J. H., Yunanto, S. E., Setyowati, Y., & Supardal, S. (2022). E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan *E-Government* di Indonesia Tahun 2003-2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1), 37–53. <https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.27>

SUMBER LAIN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan *E-Government*

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LAMPIRAN

Gambar Surat Penunjuk Dosen Pembimbing



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No.3295SKJBAN-PT/Ak-PPJISN/2020)

Alamat Jl. Tm1oho No 317 Yogyakarta<rt< 55225 Telp (0274) 561971.550775 Fax (0274) 515989

Nomor : 085/PEM/JfX/2024

Hal : Penunb!Aptr /Men
Pembimbingan Skrlusi

Kepada :

Analius Giawn. JP.,M. i


Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan TPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Tbu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	Silas C.A Imbeyoper
o. Mahasiswa	20520015
Program Studi	Ilmu Pemcrintahan
Tanggal Ace Judul	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024
Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

Gambar Surat Permohonan Izin Penelitian



YOGYAKARTA, 13 Desember 2024
Kepada Yth :
Lurah Widodomartani, Kapanewon Ngeemplak, Kabupaten Sleman
Di tempat.

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta

STATUS TERAKREDITASI BAK-TEKNIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER TEKNIK, TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor 9861/U/2024
Hal Permohonan izin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Widodomartani, Kapanewon Ngeemplak, Kabupaten Sleman
Di tempat.

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (SI) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama	Silas Cllaudio Adam Imbeyoper
No Mbs	20520015
Program Studi	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	Pemerintah Kalurahan dalam Penerapan Pelayanan Berbasis E-Government terhadap Masyarakat
Tempat	Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngeemplak., Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing	Analius Giawa, S.IP., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Desember 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

Gambar Surat Tugas Penelitian



\\\"A I' c,I\111\t,\ I' 111111\N II 1111111:\S\01,\AI<AIUA
I I OJ \II II (,(,11'I IB \NC,I ""\N \I 'i\ Alt\I\ \I III SA i\I' IU"
\OC,\1 \ttI\
\lu ..Utd ln tltm III

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 51

Website: www.apmd.ac.id Email: info@apmd.ac.id

SUH I' I'UGA'
NI>IIIII 10/11/2014

),t\11 ,J.,lah rui l\'mhnngunnn Mnsynmknt Desu "APMD" Yogynknta memhcriknn tugu
l.q\8,l :

ama	Silos C'loudio Admn Imbcyopcr
.,>nl(t\I' Maha iswa	20520015
Program Studi	Ihnu Pcncrintohun.
JcfIJJJlllg	Sugann (S-1).
keprluan	Mclnksanoknn Penelitian.
	n. Tempat Knlurahan Widodomrtani, Kapanewon Ngemplak,
	Kabupaten Slcman
	b. Sasaran Pemcrintah Kalurahan dalam Pcncrapan Pclayanan
	Bcrbasis E-Government terhadap Mnsynrakat
	c. Waktu 11Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 13 Desember 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN:

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon sural tugas ini diserahkan kcpada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepalo Desa!Kepala Kelurahan!Pejabat Instansi tempat penelitian ballwa mahasiswa tersebutteloh meloksanakan penclitian.

Gambar Surat Balasan Izin Penelitian dari Kalurahan Widodomartani



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON NGEMPLAK
LURAH WIDODOMARTANI**

ꦭꦸꦫꦲꦮꦶꦢꦺꦴꦩꦂꦠꦤ꧀

Jelen Jengkeng, Widodomartani, Ngemplak, Sleman. 55584
Telepon (0274) 4461469

No 423 /91
Hal Izin Penelitian

Widodomartani, 24 Desember 2024

Kepada:

Yth. Ketua Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa
(APMD)
di Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
'APMD' Yogyakarta Nomor 98611/U/2024 perihal Permohonan Ijin
Penelitian maka dengan ini Pemerintah Kalurahan Widodomartani
mengijinkan kegiatan Penelitian lapangan dalam rangka penyusunan Skripsi
dengan Judul "Pemerintah kalurahan dalam Penerapan Pelayanan Berbasis
E-Government terhadap Masyarakat oleh Mahasiswa :

Nama : Silas Claudio Adam Imbeyoper

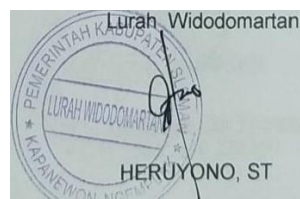
No. MHS : 20520015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan kelenluan sebagai berikut

1. Menjaga ketertiban Masyarakat
2. apabila telah selesai penelitian agar melaporkan ke Lurah Widodomartani

Demikian surat ijin ini disampaikan harap dipergunakan sebagaimana
semeslinya.



Gamabr



Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025

Keterangan

Foto Bersama Bapak
Heruyono, ST. Usia 45
Tahun Sebagai Lurah
Kalurahan Widodomartani.



Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025

Foto Bersama Bapak
Taufiq W, SH. Usia 55
Tahun bekerja sebagai
Carik Kalurahan
Widodomartani.



Foto Bersama Ibu Evi. Usia
32 Tahun bekerja sebagai
Pelayanan Administrasi
Kalurahan Widodomartani.

Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025



Foto Bersama Ibu Galuh
Rahayu. Usia 27 Tahun
bekerja sebagai Karyawan
Alfamarta. (Masyarakat
Kalurahan
Widodomartani)

Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025



Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025

Foto Bersama Ibu Sri Rahayu. Usia 57 Tahun bekerja sebagai Petani. (Masyarakat Kalurahan Widodomartani)



Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025

Foto Bersama Bapak Abu Mujiona. Usia 75 tahun bekerja sebagai petani tua. (Masyarakat Kalurahan Widodomartani)



Foto Bersama Ibu Sulistiawati. Usia 50 Tahun bekerja sebagai petani. (Masyarakat Kalurahan Widodomartani)

Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025



Foto Bersama Ibu Sumi. Usia 70 Tahun bekerja sebagai petani tua. (Masyarakat Kalurahan Widodomartani)

Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025



Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025

Foto bersama Bapak Panggung Wantoro. Usia 57 Tahun Bekerja Sebagai Buruh. (Masyarakat Kalurahan Widodomartani)



Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025

Foto Bersama Bapak Suryanto. Usia 42 Tahun bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar. (Masyarakat Kalurahan Widodomartani)



Sumber : Dokumen Lapangan Peneliti 2025

Foto Bersama Ibu Puji Lestari. Usia 45 Tahun bekerja sebagai pedagang dan

Foto Bersama Mas Feri. Usia 25 Tahun Seorang Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. (Masyarakat Kalurahan Widodomartani)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Tingkat Pendidikan :

B. Daftar Pertanyaan

a. Daftar Pertanyaan untuk pemerintah Kelurahan

1. Apa alasan utama pemerintah desa mengimplementasikan sistem *E-Government* dalam pelayanan publik?
2. Layanan *E-Government* apa saja yang telah disediakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat?
3. Sejak kapan pemerintah desa mulai menerapkan *E-Government* dalam pelayanan kepada masyarakat?
4. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah desa dalam mengimplementasikan *E-Government* di tingkat desa?
5. Bagaimana pemerintah desa memastikan aksesibilitas layanan *E-Government* bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak familiar dengan teknologi?

6. Apakah terdapat pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat agar dapat menggunakan layanan *E-Government* dengan baik?
7. Apa langkah yang diambil pemerintah desa untuk mengatasi masalah keterbatasan infrastruktur teknologi (seperti akses internet) di daerah terpencil?
8. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa data pribadi masyarakat yang terlibat dalam layanan *E-Government* terlindungi dengan baik?
9. Sejauh mana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan sistem *E-Government*?
10. Apakah penerapan *E-Government* berdampak pada peningkatan efisiensi pelayanan publik di desa? Jika ya, dalam bentuk apa?
11. Apa langkah yang diambil pemerintah desa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem *E-Government*?
12. Apakah pemerintah desa memiliki mekanisme untuk menerima umpan balik atau keluhan dari masyarakat terkait layanan *E-Government*?
13. Bagaimana pemerintah desa mengevaluasi kinerja sistem *E-Government* yang telah diterapkan? Apakah ada indikator kinerja yang digunakan?
14. Apa saja kendala teknis atau non-teknis yang dihadapi dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem *E-Government* di desa?

15. Apa rencana pemerintah desa untuk pengembangan dan perbaikan lebih lanjut dalam pelayanan berbasis *E-Government* di masa depan?

b. Daftar Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah desa menyediakan layanan berbasis *E-Governmen* ?
2. Seberapa sering Anda menggunakan layanan *E-Government* yang disediakan oleh pemerintah desa?
3. Layanan *E-Government* apa yang paling sering Anda gunakan (misalnya, administrasi kependudukan, permohonan surat, dll)?
4. Bagaimana Anda mengetahui informasi tentang layanan *E-Government* yang disediakan oleh pemerintah desa?
5. Apakah Anda merasa mudah dalam mengakses dan menggunakan layanan *E-Government* yang ada di desa?
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan *E-Government*? Jika ya, apa kesulitan yang Anda hadapi?
7. Sejauh mana Anda puas dengan kemudahan penggunaan platform *E-Government* yang disediakan oleh pemerintah desa?
8. Apakah Anda merasa bahwa layanan *E-Government* dapat mempercepat proses pelayanan dibandingkan dengan cara konvensional?
9. Apakah Anda merasa bahwa informasi yang disampaikan melalui *E-Government* cukup jelas dan mudah dipahami?

10. Apakah Anda merasa layanan *E-Government* membantu mengurangi antrian atau waktu tunggu dalam mendapatkan pelayanan desa?
11. Bagaimana Anda menilai tingkat keamanan dan kerahasiaan data pribadi Anda saat menggunakan layanan *E-Government*?
12. Apakah Anda merasa bahwa layanan *E-Government* dapat meningkatkan transparansi dalam pemerintahan desa?
13. Apakah Anda merasa lebih terlibat dalam proses pemerintahan desa sejak penerapan layanan *E-Government*?
14. Apakah ada fitur atau layanan yang menurut Anda perlu ditambahkan atau diperbaiki dalam sistem *E-Government*?
15. Apa saran atau harapan Anda untuk pengembangan lebih lanjut dari layanan *E-Government* di desa?